



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
No. 127/ITDel/Rek/SK/X/17**

Tentang

**EVALUASI INTERNAL PROGRAM STUDI INSTITUT TEKNOLOGI DEL
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dipandang perlu untuk mengadakan Evaluasi Internal Program Studi;
- b. bahwa kegiatan Evaluasi Internal Program Studi diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan akademik di setiap Fakultas dan Program Studi mendukung Visi dan Misi Institut Teknologi Del serta pelaksanaan kegiatan akademik yang dilakukan di setiap Fakultas dan Program Studi terarah dan terkoordinasi dengan baik;
- c. bahwa Evaluasi Internal Program Studi merupakan upaya untuk mencapai standar mutu pada taraf nasional; dan
- d. bahwa Evaluasi Internal Program Studi perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Institut Teknologi Del.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44, Tahun 2015; tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 Tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);
9. Statuta Institut Teknologi Del Tahun 2014;
10. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 025/YD/SK/X/2016, tanggal 14 Oktober 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Del;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del tentang Evaluasi Internal Program Studi di Lingkungan Institut Teknologi Del;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Keputusan ini;

1. Institut adalah Institut Teknologi Del (IT Del) sebagai badan penyelenggara pendidikan yang berbentuk Perguruan Tinggi Swasta;
2. Rektor adalah Pimpinan Institut Teknologi Del yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Institut Teknologi Del;
3. Fakultas adalah penyelenggara kegiatan Institut Teknologi Del dalam dana dan/atau satu disiplin ilmu tertentu;
4. Dekan adalah Pimpinan Fakultas dalam lingkungan Institut Teknologi Del yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Fakultas;
5. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau vokasi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum;
6. Program Vokasi adalah program pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu yang terdiri atas diploma III dan IV;
7. Program Sarjana adalah program pendidikan strata 1 (S-1) yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu dan memberikan hak menyandang gelar Sarjana kepada lulusannya;
8. Penyelenggara Pendidikan adalah Fakultas;
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Del;
10. Kegiatan Akademik adalah kegiatan yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian/pelayanan kepada masyarakat;
11. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 14 sampai 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian;
12. Evaluasi Internal Semester (EVISEM) adalah evaluasi diri Program Studi yang dilakukan per semester yaitu pada setiap bulan Maret dan September;
13. Evaluasi Internal Tahunan (EVITAH) adalah evaluasi diri Program Studi setiap dua semester (genap dan gasal), yaitu pada setiap bulan April;
14. Evaluasi Internal (EVIN) adalah evaluasi diri program studi setiap empat atau lima tahun sekali dan dilakukan satu tahun sebelum masa akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) terhadap Program Studi tersebut berakhir;
15. Penelitian adalah penelitian taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau desain;

16. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan yang mencakup upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia baik dalam hal perluasan wawasan, pengetahuan, maupun peningkatan keterampilan yang dilakukan oleh Sivitas Akademika sebagai perwujudan dharma bakti serta wujud kepedulian untuk berperan aktif meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat luas terlebih bagi masyarakat ekonomi lemah;
17. Publikasi adalah memasukkan hasil penelitian dalam pelbagai media ilmiah, baik di dalam maupun di luar negeri;
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu;
19. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program studi pendidikan yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Del;
20. Dosen adalah tenaga pendidik pada Institut Teknologi Del yang khusus diangkat dengan tugas mengajar, meneliti, dan mengabdikan;
21. Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga pemangku kepentingan (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan.

BAB II

TUJUAN, FUNGSI, LINGKUP, DAN MANFAAT PENYELENGGARAAN EVALUASI INTERNAL

Tujuan Pasal 2

1. Memelihara dan meningkatkan mutu Program Studi secara terstruktur, konsisten dan berkesinambungan;
2. Mengukur kinerja Program Studi secara terstruktur, konsisten, dan berkesinambungan.

Fungsi Pasal 3

1. Sebagai upaya penjaminan mutu internal Institut Teknologi Del;
2. Sebagai instrumen untuk melakukan perbaikan mutu akademik;
3. Sebagai pertanggungjawaban penyelenggaraan program kepada pimpinan Institut;
4. Sebagai salah satu langkah mempersiapkan evaluasi eksternal, baik yang bersifat nasional maupun internasional;
5. Sebagai persyaratan perpanjangan izin operasional Program Studi;
6. Sebagai persyaratan bagi Fakultas dalam membuka Program Studi baru;

Ruang Lingkup
Pasal 5

1. Membantu pimpinan Institut dan Fakultas untuk mengidentifikasi masalah akademik penyelenggaraan pendidikan;
2. Membantu pimpinan untuk melakukan evaluasi dan revisi terhadap kebijakan dan program yang telah ditetapkan;
3. Membantu pimpinan untuk mencapai visi dan misi Fakultas/Institut.

BAB III
EVALUASI INTERNAL SEMESTERAN (EVISEM)

Sasaran Penyelenggaraan EVISEM
Pasal 6

1. EVISEM menunjukkan status mutu penyelenggaraan pendidikan;
2. Instrumen EVISEM dirancang berdasarkan kebutuhan Institut untuk mengetahui pencapaian mutu penyelenggaraan Program Studi dalam kurun waktu satu semester berdasarkan kriteria dan indikator yang merujuk kepada Standar Nasional Pendidikan dan Komponen Mutu untuk Akreditasi Program Studi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT);
3. EVISEM dilakukan terhadap setiap Program Studi di lingkungan Institut Teknologi Del yang mencakup program pendidikan vokasi dan sarjana.

Komponen EVISEM
Pasal 7

Instrumen Evaluasi Mutu Internal (EMI) Semesteran Program Studi terdiri dari:

1. Kurikulum Program Studi
2. Sumber Daya Manusia (dosen dan tenaga penunjang)
3. Mahasiswa dan Kompetensi Lulusan
4. Proses Belajar Mengajar
5. Sarana dan Prasarana Akademik
6. Suasana Akademik
7. Penelitian dan Publikasi
8. Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan dan Metode EVISEM
Pasal 8

1. Penyelenggara Pendidikan melaksanakan EVISEM;
2. Evaluasi Semesteran dilaksanakan dengan cara mengisi borang dengan konten seperti tertera pada Lampiran I;
3. Cara pengisian borang dilakukan dengan aplikasi ataupun secara daring (*online*);
4. Data yang diisi adalah data satu semester yang baru saja berakhir.

Waktu Pelaksanaan EVISEM
Pasal 9

Evaluasi Internal Semesteran dilaksanakan pada setiap bulan Maret dan September.

Evaluasi
Pasal 10

1. Data EVISEM dievaluasi oleh Satuan Penjaminan Mutu (SPM) dan hasil evaluasi didiskusikan dengan Program Studi untuk perbaikan mutu;
2. Hasil evaluasi dan perbaikan mutu diserahkan kepada Fakultas;
3. Direktur Pendidikan mengevaluasi hasil EVISEM untuk keperluan perumusan rencana tindak dan untuk peningkatan mutu Program Studi yang berkelanjutan.

BAB IV
EVALUASI INTERNAL TAHUNAN (EVITAH)

Sasaran Penyelenggaraan EVITAH
Pasal 11

1. EVITAH merupakan tindak lanjut Pimpinan Fakultas dan Program Studi untuk perbaikan mutu Program Studi berdasarkan hasil tinjauan (*review*) EVISEM selama 1 (satu) tahun akademik.
2. EVITAH dilakukan terhadap seluruh Program Studi di lingkungan Institut Teknologi Del yang mencakup program pendidikan vokasi dan sarjana.

Komponen EVITAH
Pasal 12

Komponen yang dievaluasi dalam penyelenggaraan EVITAH adalah;

1. Standar Isi;
2. Standar Proses;
3. Standar Kompetensi Lulusan;
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
5. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan;
6. Pengelolaan Program Studi;
7. Standar Pembiayaan;
8. Standar Penilaian;
9. Standar Penelitian;
10. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat;
11. Standar Kerjasama.

Pelaksanaan dan Metode EVITAH
Pasal 13

1. Program Studi melaksanakan EVITAH;

2. EVITAH dilaksanakan dengan cara mengisi borang dengan konten seperti tertera pada Lampiran II;
3. Cara pengisian borang dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi ataupun secara daring;
4. Data yang digunakan adalah data dua semester (genap dan gasal) yang baru berakhir.

Waktu Pelaksanaan EVITAH Pasal 14

EVITAH dilaksanakan pada bulan April setelah EVISEM semester genap dan gasal dievaluasi.

Pelaporan dan Evaluasi Pasal 15

1. Data EVITAH dievaluasi oleh Satuan Penjaminan Mutu (SPM) dan hasil evaluasi didiskusikan dengan Program Studi untuk perbaikan mutu;
2. Hasil Evaluasi dan usulan perbaikan diserahkan oleh SPM kepada Fakultas;
3. Pimpinan Fakultas melaporkan hasil EVITAH kepada Direktorat Pendidikan berikut dengan rencana perbaikan.

BAB V EVALUASI INTERNAL (EVIN)

Sasaran Penyelenggaraan EVIN Pasal 16

1. EVIN dilakukan terhadap seluruh Program Studi di lingkungan Institut Teknologi Del yang mencakup program pendidikan vokasi dan sarjana;
2. Program Studi yang dimaksud dalam ayat satu adalah Program Studi yang satu tahun lagi habis masa akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).

Komponen EVIN Pasal 17

Komponen yang digunakan dalam penyelenggaraan evaluasi empat tahun adalah:

1. Jati diri, Visi, Misi, dan Tujuan;
2. Komponen Tata pamong dan pengelolaan;
3. Komponen Mahasiswa dan Lulusan;
4. Komponen Kurikulum;
5. Komponen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
6. Komponen Sumber Daya Manusia;
7. Komponen Prasarana dan Sarana;
8. Komponen Sistem Informasi;
9. Komponen Pembiayaan;
10. Komponen Kerjasama;

11. Komponen Penjaminan Mutu Internal.

Ruang Lingkup Kegiatan EVIN Pasal 18

Kegiatan Evaluasi Internal meliputi:

1. Penyusunan Laporan Evaluasi Diri oleh Program Studi;
2. Asesmen Laporan Evaluasi diri oleh Asesor Internal IT Del dan SPM;
3. Visitasi oleh Asesor Internal IT Del;
4. Penilaian akhir dan Rekomendasi perbaikan oleh Asesor Internal IT Del dan SPM.

Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Program Studi Pasal 19

1. Pimpinan Program Studi membentuk tim penyusunan Evaluasi Diri Program Studi;
2. Tim Penyusun Evaluasi Diri Program Studi dan mengisi borang EVIN;
3. Penyusunan Laporan Evaluasi Diri mengikuti Pedoman Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Program Studi yang dikeluarkan oleh SPM IT Del;
4. Pimpinan Program Studi mengirim Laporan Evaluasi Diri sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Visitasi dan Penilaian Pasal 20

1. Visitasi dilakukan oleh asesor internal yang ditunjuk berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Visitasi dilakukan berdasarkan Buku Pedoman Visitasi yang diterbitkan oleh SPM;
3. Pelaksanaan visitasi mengikuti jadwal yang telah ditentukan;
4. Penilaian mengikuti Buku Pedoman Evaluasi Internal yang diterbitkan oleh SPM.

Pelaporan dan Evaluasi Pasal 21

1. Laporan EVIN seluruh Program Studi disampaikan oleh SPM kepada pimpinan Institut;
2. Laporan EVIN memuat hasil Evaluasi, Penilaian, dan Rekomendasi perbaikan mutu Program Studi yang disusun oleh SPM dan Asesor Internal.

Asesor Internal IT Del Pasal 22

Asesor Internal IT Del adalah dosen IT Del yang telah memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

1. Telah mengikuti pelatihan asesor internal yang diselenggarakan SPM IT Del;
2. Memiliki kemampuan dan komitmen untuk melaksanakan EVIN;
3. Memahami kode etik asesor internal.

BAB VI

PELAKSANAAN EVALUASI INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Tahap Persiapan Pasal 23

1. Satuan Penjaminan Mutu menyiapkan pedoman dan instrumen Evaluasi Internal Institut Teknologi Del;
2. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi bertugas merancang program daring atau aplikasi untuk keperluan Evaluasi Internal Institut Teknologi Del.

Tahap Pelaksanaan Pasal 24

1. Unit Penjaminan Mutu Fakultas memantau dan memfasilitasi pelaksanaan evaluasi internal di tingkat Fakultasnya masing-masing;
2. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi menyiapkan dan memelihara penggunaan aplikasi ataupun program daring Evaluasi Internal;
3. Program Studi bertugas melaksanakan EVISEM, EVITAH, dan EVIN;
4. Pimpinan Fakultas memantau dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan EVISEM, EVITAH, dan EVIN Program Studi;
5. Pimpinan Fakultas mengesahkan dokumen laporan EVITAH dan EVIN serta mengirimkannya ke Institut.

Tahap Evaluasi Pasal 25

1. Satuan Penjaminan Mutu bertugas melakukan evaluasi terhadap hasil EVISEM dan EVITAH;
2. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi bertugas melakukan evaluasi terhadap fungsi program daring Evaluasi Internal Institut Teknologi Del;
3. Direktorat Pendidikan mengevaluasi EVITAH untuk kepentingan penilaian kinerja Dekan ataupun Ketua Program Studi, hibah kompetisi, dan keperluan lain;
4. Satuan Penjaminan Mutu merekapitulasi hasil EVIN yang dapat menjadi data evaluasi mutu internal sehingga dapat memetakan pencapaian terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi, selanjutnya dibuat rekomendasi perbaikan dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan guna mempersiapkan akreditasi BAN PT maupun akreditasi lainnya dan menyampaikan laporan evaluasi kepada Pimpinan Institut;
5. Dekan dan Ketua Program Studi melaksanakan rencana tindak lanjut peningkatan mutu sesuai dengan rekomendasi perbaikan dari hasil kegiatan EVIN.

BAB VII SANKSI

Pasal 25

Apabila Dekan tidak melaporkan hasil EVISEM, EVITAH, dan EVIN sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka akan diberikan sanksi berupa antara lain:

1. Peringatan tertulis;
2. Wajib mengikuti program pembinaan;
3. Tidak dapat diproses perpanjangan jabatannya;
4. Tidak dapat dilibatkan dalam program Hibah Kompetensi;
5. Para dosen dari Program Studi yang terkena sanksi tidak dapat mengikuti Sertifikasi Dosen.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 27

1. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Institut sepanjang tidak bertentangan;
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Laguboti, Toba Samosir pada tanggal 18 Oktober 2017

Institut Teknologi Del

Rektor,



Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M. Tech., Ph.D.

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Del;
2. Kepala Yayasan Del Cabang Sumatera Utara;
3. Ketua Senat Akademika IT Del;
4. Para Wakil Rektor IT Del;
5. Ketua Badan Penjaminan Mutu;
6. Para Direktur;
7. Para Dekan Fakultas;
8. Para Ketua Program Studi di lingkungan IT Del;
9. Peringgal.

LAMPIRAN I. KONTEN EVALUASI INTERNAL SEMESTERAN

1. Pendahuluan

Evaluasi Internal Semesteran Program Studi (PS) adalah alat untuk melihat apakah standar mutu yang telah ditetapkan pada dokumen akademik telah dilaksanakan oleh Program Studi.

Isian Evaluasi Internal Semesteran diisi oleh Ketua Program Studi atas pertimbangan Gugus Penjaminan Mutu Fakultas.

Evaluasi Internal Semesteran terdiri dari sepuluh butir mutu akademik meliputi:

1. Kurikulum Program Studi
2. Sumber Daya Manusia (dosen dan tenaga penunjang)
3. Mahasiswa dan Kompetensi Lulusan
4. Proses Belajar Mengajar
5. Sarana dan Prasarana Akademik
6. Suasana Akademik
7. Penelitian dan Publikasi
8. Pengabdian kepada Masyarakat

2. Penjelasan Butir Mutu Akademik

2.1. Kurikulum Program Studi

Kurikulum ialah keseluruhan rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan belajar mengajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di suatu Program Studi untuk mencapai kompetensi tertentu sesuai standar pendidikan tinggi. Kurikulum memberikan informasi tentang materi dan bahan kajian, sarana dan proses belajar mengajar dan penilaiannya untuk mencapai kompetensi hasil belajar (*learning outputs* dan *outcomes*). Dalam pendidikan tinggi, kurikulum disusun untuk suatu bidang studi tertentu dan digunakan sebagai pedoman kegiatan instruksional. Mengingat lingkungan pendidikan yang senantiasa mengalami perubahan, maka kurikulum perlu disesuaikan dan dikembangkan secara periodik, tanpa mengesampingkan keterkaitan pihak pemangku kepentingan.

2.2. Sumber Daya Manusia

Mutu pendidikan tinggi ditentukan juga oleh sumber daya manusia selain oleh organisasi yang sehat dan manajemen yang efektif. Komitmen pimpinan dan staf pada mutu perencanaan dan penyelenggaraan program merupakan hal yang sangat menentukan kinerja Program Studi. Untuk mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat diperlukan adanya program pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan SDM diperlukan juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan program dan kinerja organisasi. Hasil dari upaya tersebut tercermin dalam mutu proses belajar mengajar, mutu lulusan dan mutu pelayanan Tri Dharma pada pemangku kepentingan.

2.3. Mahasiswa dan Kompetensi Lulusan

Penilaian pada aspek mahasiswa merupakan salah satu komponen terpenting dari keseluruhan proses belajar mengajar. Pelaksanaan penilaian hasil belajar yang tepat akan

menentukan sejauh mana pencapaian tujuan belajar (*learning outcome*), yang selanjutnya akan menentukan keberhasilan penyelenggaraan program studi. Selain itu, Program Studi diharapkan dapat menjamin kompetensi lulusan, sehingga pemangku kepentingan tidak ragu-ragu dalam menilai dan menetapkan penggunaan lulusannya.

2.4. Proses Belajar Mengajar

Kriteria proses belajar mengajar berhubungan dengan usaha Program Studi untuk menyediakan pengalaman belajar yang bermutu bagi mahasiswa. Pemantauan kemajuan belajar dan pencapaian hasil belajar mahasiswa sangat diperlukan untuk: (i) menilai kesesuaian proses akademik dengan kurikulum yang dipakai, (ii) mengetahui masalah yang perlu ditanggulangi, (iii) menyempurnakan proses belajar, (iv) menilai keberhasilan dosen dalam melakukan tugas, dan (v) mengukur kemampuan diri mahasiswa. Cakupan evaluasi meliputi aspek-aspek ketersediaan Rencana Acara Perkuliahan (RAP) atau Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) atau Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dan bahan ajar.

2.5. Sarana dan Prasarana Akademik

Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif memerlukan dukungan tersedianya sumber daya pembelajaran yang memacu dinamika berpikir, menunjang pertumbuhan dan perkembangan mahasiswa secara utuh. Sumber daya pembelajaran seperti ketersediaan ruang, ruang baca konvensional dan digital, peralatan laboratorium, alat bantu pembelajaran dan teknologi informasi harus dapat diakses dengan mudah oleh dosen dan mahasiswa. Hal ini dapat menunjang program pendidikan, penelitian, dan memberi kesempatan untuk mengenal berbagai disiplin ilmu, budaya, serta cara berpikir dan belajar.

2.6. Suasana Akademik

Program Studi harus berupaya membangun lingkungan sosial secara harmonis dan sinergis untuk mendukung pengembangan kepribadian yang utuh. Tujuan yang ingin dicapai ialah menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan yang telah dipilih, sehingga lulusan memiliki kesiapan pengetahuan dan wawasan, sikap dan perilaku masyarakat ilmiah untuk memasuki dunia kerja. Kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan Program Studi juga dapat ditingkatkan melalui kemudahan akses informasi, kesempatan melakukan kegiatan ekstrakurikuler, adanya program bimbingan dan konseling untuk bantuan konsultasi memadai bagi mahasiswa, agar mahasiswa mampu mencapai prestasi belajar yang optimal. Komunikasi dua arah, pengelolaan konflik dan perbedaan persepsi, partisipasi semua pihak akan mendorong motivasi internal. Kriteria yang dievaluasi meliputi bimbingan akademik, beasiswa, pemanfaatan teknologi informasi, dan keberadaan kelompok studi.

2.7. Penelitian dan Publikasi

Penelitian dosen dan mahasiswa dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Strategi pengembangan dan kebijakan penelitian di Program Studi harus dicantumkan dalam Rencana Strategis Program Studi. Penelitian harus relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini dan masa mendatang. Orientasi dari penelitian diarahkan agar inovasi yang dilakukan dapat dimanfaatkan oleh swasta, masyarakat, atau pengguna lainnya. Setiap hasil kegiatan penelitian harus disebarluaskan, dipublikasikan dalam situs, seminar, jurnal dalam atau luar negeri, serta berpeluang mendapatkan hak cipta atau paten.

2.8. Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dalam rangka penerapan dan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan bidang ilmu Program Studi. Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian pada masyarakat harus mengacu pada standar tertuang dalam Manual Mutu Pengabdian pada Masyarakat IT Del, serta arahan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat. Kegiatan pengabdian pada masyarakat harus relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat dan bidang ilmu Program Studi. Kegiatan pengabdian pada masyarakat harus sesuai dengan profesionalisme dosen dan mahasiswa, berdampak pada pengakuan masyarakat, memberikan pencerahan, dan mensejahterakan masyarakat. Dana kegiatan dapat berasal dari dana mandiri, Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) dan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), lembaga donor, dan kerjasama dengan lembaga terkait.

3. Evaluasi Kinerja Program Studi

3.1. Kurikulum Program Studi

Aspek yang dievaluasi ialah identifikasi kebutuhan pengguna lulusan Program Studi, relevansi kurikulum, kesesuaian kurikulum dengan standar internasional, dan upaya Program Studi untuk memenuhi pencapaian pembelajaran atau kompetensi lulusan.

Petunjuk:

- ❖ Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan kondisi yang ada di Program Studi Saudara dengan memberi lingkaran.
 - ❖ Untuk pertanyaan terbuka, uraikan kondisi yang ada di Program Studi Saudara.
1. Apakah Program Studi pernah melakukan pertemuan dengan pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan bagi identifikasi kebutuhan pengguna lulusan Program Studi?
 - a. Tidak [0]
 - b. Ya, sebutkan:.... kali [5]
(Dokumen mohon dilampirkan)
 2. Dalam menjamin relevansi kurikulum, apakah kelompok dosen dalam minat studi atau konsentrasi studi yang sama telah bertemu untuk mendiskusikan tentang: (nilai tiap butir = 2, kemudian dijumlahkan; jawaban bisa lebih dari satu)?
 - a. Relevansi matakuliah
 - b. Pembaruan buku teks
 - c. Isu-isu mutakhir di tingkat nasional dan internasional
 - d. Proses belajar mengajar
 - e. Pengembangan silabus dan materi ajar
 - f. Penentuan komponen evaluasi kinerja mahasiswa
 - g. Lainnya, sebutkan
 3. Apakah Program Studi sudah mempunyai rumusan capaian pembelajaran atau kompetensi lulusan yang sesuai dengan standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)?
 - a. Belum [0]
 - b. Sudah [5]
(Dokumen mohon dilampirkan)

4. Dalam proses perumusan capaian pembelajaran atau kompetensi, apakah Program Studi sudah mengikutsertakan masukan dari pengguna lulusan (*user*) dan asosiasi profesi?
 - a. Belum [0]
 - b. Sudah [5]
 (Dokumen mohon dilampirkan)
5. Apakah rumusan capaian pembelajaran atau kompetensi lulusan sudah disosialisasikan kepada mahasiswa?
 - a. Belum [0]
 - b. Sudah [5]
 (Dokumen mohon dilampirkan)

3.2. Sumber Daya Manusia (dosen dan tenaga penunjang)

Untuk meningkatkan kinerja Program Studi maka perlu dilaksanakan program pengembangan akademik dosen dan tenaga penunjang. Evaluasi dilakukan terhadap program-program yang terkait dengan peningkatan kapasitas, mekanisme umpan balik, beban kerja dosen, dan indikator kinerja dosen dan tenaga kependidikan.

Petunjuk:

- ❖ Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan kondisi yang ada di Program Studi Saudara dengan memberi lingkaran.
- ❖ Untuk pertanyaan terbuka, uraikan kondisi yang ada di Program Studi Saudara.

1. Apakah proses dan hasil program pengembangan dosen dan tenaga penunjang dipantau atau dimonitor oleh Program Studi?
 - a. Tidak dimonitor [0]
 - b. Dimonitor, dengan cara:.... [5]
 (Dokumen mohon dilampirkan)
2. Apakah Program Studi memiliki alokasi dana untuk program pengembangan dosen?
 - a. Tidak ada alokasi dana [0]
 - b. Ada alokasi dana, relatif tidak mencukupi [2]
 - c. Ada alokasi dana, relatif mencukupi [5]
 - d. Ada alokasi dana, relatif kurang dimanfaatkan oleh staf [3]
 (Dokumen mohon dilampirkan)
3. Apakah ada mekanisme umpan balik terhadap penyelenggaraan Program Studi yang berasal dari: (nilai tiap butir = 2, kemudian dijumlahkan; jawaban bisa lebih dari satu)?
 - a. Mahasiswa
 - b. Dosen
 - c. Tenaga penunjang
 - d. Pengguna lulusan
 - e. Alumni
 - f. Lain-lain: (dijumlahkan; maksimum 10)
 (Dokumen mohon dilampirkan)
4. Apakah Program Studi melaporkan beban tugas atau tugas (*workload/full time equivalent/FTE*) dosen untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan institusi?
 - a. Belum [0]

- b. Sudah rutin dilakukan namun tidak dilaporkan [2]
 - c. Sudah [5]
- (Dokumen tentang rincian beban kerja tiap dosen per semester untuk semua kegiatan mohon dilampirkan)
5. Apakah Program Studi memiliki tolok ukur (indikator kinerja) dosen dan tenaga penunjang?
- a. Belum [0]
 - b. Hanya dosen atau tenaga penunjang [2]
 - c. Sudah [5]
- (Dokumen tentang rincian indikator kinerja dosen dan tenaga penunjang Program Studi mohon dilampirkan)

3.3. Mahasiswa dan Kompetensi Lulusan

Aspek yang dinilai adalah upaya pemantauan mutu mahasiswa yang masuk, peningkatan kemampuan mahasiswa, dan prestasi yang dicapai mahasiswa. Kriteria ini dapat dipakai sebagai instrumen untuk mengukur derajat kepercayaan Program Studi dalam penjaminan kompetensi lulusannya.

Petunjuk:

- ❖ Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan kondisi yang ada di Program Studi Saudara dengan memberi lingkaran.
- ❖ Untuk pertanyaan terbuka, uraikan kondisi yang ada di Program Studi Saudara.

1. Apakah ada kecenderungan kenaikan nilai rata-rata ujian masuk dalam tiga tahun terakhir?
 - a. Tidak tahu [0]
 - b. Tidak ada kenaikan [3]
 - c. Ada kenaikan dari menjadi [5]

(Dokumen mohon dilampirkan)
2. Apakah ada usaha Program Studi untuk promosi guna meningkatkan minat atau animo calon mahasiswa?
 - a. Tidak ada [0]
 - b. Ada [2]

(Dokumen mohon dilampirkan)
3. Apakah sebagian besar mahasiswa mengalami kenaikan rata-rata Indeks Prestasi (IP) mahasiswa dalam dua semester terakhir?
 - a. Tidak [0]
 - b. Ya berapa % [5]

(Dokumen mohon dilampirkan)
4. Apakah Program Studi melakukan analisis *cohort* untuk evaluasi prestasi mahasiswa? Analisis *cohort* adalah analisis kemajuan belajar mahasiswa (jumlah sks dan Indeks Prestasi Kumulatif) yang dilaksanakan bagi kelompok mahasiswa yang berasal dari satu angkatan.
 - a. Tidak pernah [0]
 - b. Kadang-kadang [3]
 - c. Selalu [5]

(Dokumen mohon dilampirkan)

5. Apakah usaha Program Studi dalam meningkatkan aktivitas dan kreativitas mahasiswa (jawaban bisa lebih dari 1; nilai tiap butir = 1; maksimum = 5)
 - a. Melalui kegiatan kemahasiswaan
 - b. Melalui kegiatan penelitian ilmiah mahasiswa
 - c. Melalui kelompok studi
 - d. Melalui kelompok inovasi
 - e. Lainnya:
 (Dokumen mohon dilampirkan)

3.4. Proses Belajar Mengajar

Pemantauan proses belajar mengajar sangat diperlukan untuk menilai keberhasilan dosen dalam melakukan tugas dalam Proses Belajar Mengajar (PBM). Aspek yang dievaluasi adalah perencanaan pembelajaran, pengembangan bahan ajar, evaluasi proses belajar mengajar dan hasil belajar, dan pemantauan oleh Program Studi.

Petunjuk:

- ❖ Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan kondisi di Program Studi Saudara dengan memberi tanda lingkaran, bisa lebih dari satu.
- ❖ Untuk pertanyaan terbuka, uraikan kondisi yang ada di Program Studi Saudara.

1. Berapa persen (%) matakuliah yang telah ada GBPP/SAP yang dapat dibaca atau diperoleh oleh mahasiswa?
 - a. 10 – 25% [1]
 - b. >25 – 50% [2]
 - c. >50 – 75% [3]
 - d. >75% [5]
 (Dokumen mohon dilampirkan)
2. Berapa persen (%) matakuliah yang dilengkapi dengan diktat (*hand out* atau *lecture notes*)?
 - a. 10 – 25% [1]
 - b. >25 – 50% [2]
 - c. >50 – 75% [3]
 - d. >75% [5]
 (Dokumen mohon dilampirkan)
3. Apakah Program Studi menganjurkan metode belajar mengajar berpusat pada mahasiswa (*student-centered learning* atau *learner oriented*)?
 - a. Tidak [0]
 - b. Ya [5]
 (Dokumen mohon dilampirkan)
4. Apakah Program Studi Saudara memiliki Prosedur Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa mencakup aspek: (jawaban bisa lebih dari 1; nilai tiap butir = 1)
 - a. Prosedur penyerahan soal ujian
 - b. Prosedur analisis soal ujian
 - c. Prosedur ujian Tugas Akhir
 - d. Prosedur penilaian Tugas Akhir
 - e. Lainnya:
 (Dokumen mohon dilampirkan)

5. Apakah Program Studi melakukan pengkajian (*review*) soal ujian oleh teman sejawat?
- a. Tidak dilakukan [0]
 - b. Kadang-kadang [3]
 - c. Dilakukan [5]
- (Dokumen mohon dilampirkan)

3.5. Sarana dan Prasarana Kegiatan Akademik

Aspek yang dievaluasi ialah pelayanan bermutu dari fasilitas pendukung antara lain laboratorium, pustaka, dan akses sistem informasi yang dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Petunjuk:

- ❖ Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan kondisi yang ada di Program Studi Saudara dengan memberi lingkaran.
- ❖ Untuk pertanyaan terbuka, uraikan kondisi yang ada di Program Studi Saudara.

1. Apakah Program Studi menyediakan tempat belajar (*in door* atau *out door*) untuk mahasiswa menyelesaikan tugas terstruktur, bekerja berkelompok, berdiskusi sesuai kebutuhan dan tujuan belajar mengajar Program Studi?
 - a. Tidak [0]
 - b. Ya [5]
2. Apakah Program Studi menyediakan laboratorium dan melakukan evaluasi periodik tentang ketersediaan dan kelayakan laboratorium untuk mendukung proses belajar mengajar sesuai kebutuhan dan tujuan Program Studi?
 - a. Tidak [0]
 - b. Ya [5]

(Dokumen mohon dilampirkan)
3. Apakah di Program Studi ada prosedur tertulis untuk mengendalikan efektivitas penggunaan laboratorium/rumah kaca/kebun percobaan/studio?
 - a. Tidak [0]
 - b. Ya [5]

(Dokumen mohon dilampirkan)
4. Apakah sumber belajar mengajar memberikan kesempatan bagi dosen dan mahasiswa untuk menjadi pemelajar sepanjang hayat (ditinjau dari mutu dan jumlah buku, jurnal, ketersediaan internet dan lain-lain)?
 - a. Tidak [0]
 - b. Ya [5]
5. Apakah Program Studi memiliki prosedur untuk menyampaikan usulan atau saran terhadap pengadaan koleksi perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan Program Studi?
 - a. Tidak [0]
 - b. Ya [5]

(Dokumen mohon dilampirkan)

3.6. Suasana Akademik

Aspek yang dievaluasi adalah terkait dengan bantuan konsultasi memadai bagi mahasiswa, beasiswa, pemecahan keluhan, dan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Petunjuk:

- ❖ Pada pertanyaan dengan 2 pilihan, lingkari jawaban yang paling sesuai dengan kondisi di jurusan atau program studi Saudara.
- ❖ Pada pertanyaan terbuka, tuliskan jawaban Saudara.

1. Apakah pertemuan pembimbing atau penasihat akademik mahasiswa untuk konsultasi akademik terjadwal?
 - a. Belum [0]
 - b. Sudah [5]
2. Apakah ada upaya aktif Program Studi untuk mendapatkan beasiswa dari pemangku kepentingan untuk mahasiswa yang kurang mampu?
 - a. Belum [0]
 - b. Sudah [5](Dokumen mohon dilampirkan)
3. Apakah Program Studi memiliki kebijakan untuk penyelesaian keluhan dan masalah mahasiswa (*complaint handling mechanism*)?
 - a. Tidak ada [0]
 - b. Ya, namun belum berperan optimal [3]
 - c. Ya, sudah optimal [5](Dokumen mohon dilampirkan)
4. Apakah mahasiswa telah dilibatkan sebagai anggota tim peneliti dalam penelitian dosen dan/atau dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen?
 - a. Belum [0]
 - b. Sudah [5](Dokumen mohon dilampirkan)
5. Apakah Program Studi telah mendorong mahasiswa mempublikasikan hasil penelitiannya?
 - a. Belum [0]
 - b. Sudah [5](Dokumen mohon dilampirkan)

3.7. Penelitian dan Publikasi

Evaluasi dilakukan pada kebijakan mendorong aktivitas penelitian, pengembangan dan pendayagunaan hasil penelitian, dan produktivitas penelitian dan publikasinya.

Petunjuk:

- ❖ Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan kondisi di Program Studi Saudara dengan memberi tanda lingkaran.
- ❖ Untuk pertanyaan terbuka, uraikan kondisi yang ada di tempat Saudara.
- ❖ Untuk jawaban lebih dari satu, pilih beberapa butir jawaban yang sesuai dengan kondisi di tempat Saudara.

1. Apakah Program Studi telah mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan publikasinya?

- a. Belum [0]
 - b. Sudah [5]
2. Apakah Program Studi telah mendorong dosen untuk membuat peta penelitian dan mengusulkan penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat?
- a. Belum [0]
 - b. Sudah [5]
- (Dokumen mohon dilampirkan)
3. Apakah Program Studi telah merencanakan dan mengalokasikan anggaran untuk perbaikan rekam jejak (*track record*) kinerja penelitian dosen?
- a. Belum [0]
 - b. Sudah [5]
- (Dokumen mohon dilampirkan)
4. Apakah produktivitas penelitian Program Studi mengalami kenaikan selama dua semester terakhir?
- a. Belum [0]
 - b. Sudah..., sebutkan % [5]
- (Dokumen mohon dilampirkan)
5. Apakah dosen Program Studi telah mempublikasi dan mendiseminasikan hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel jurnal nasional, artikel jurnal internasional, artikel prosiding, buku teks, dan hak cipta yang diterbitkan dan disebarkan secara nasional atau internasional?
- a. Belum [0]
 - b. Sudah [5]
- (Dokumen mohon dilampirkan)

3.8. Pengabdian kepada Masyarakat

Evaluasi dilakukan terhadap adanya strategi, kebijakan dan prioritas pengabdian kepada masyarakat, serta arahan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat, bidang ilmu Program Studi, berdampak pada pengakuan masyarakat, memberikan pencerahan, dan mensejahterakan masyarakat.

Petunjuk:

- ❖ Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan kondisi di Program Studi Saudara dengan memberi tanda lingkaran.
- ❖ Untuk pertanyaan terbuka, uraikan kondisi yang ada di tempat Saudara.
- ❖ Untuk jawaban lebih dari satu, pilih beberapa butir jawaban yang sesuai dengan kondisi di tempat Saudara.

1. Apakah Program Studi telah mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat?
- a. Belum [0]
 - b. Sudah [5]
2. Apakah Program Studi telah mendokumentasikan peta jalan (*roadmap*), hasil, dan dampak pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan sivitas akademika?
- a. Belum [0]

- b. Sudah [5]
(Dokumen mohon dilampirkan)
3. Apakah Program Studi telah merencanakan dan mengalokasikan anggaran untuk perbaikan rekam jejak (*track record*) kinerja pengabdian kepada masyarakat?
c. Belum [0]
d. Sudah [5]
(Dokumen mohon dilampirkan)
4. Apakah Program Studi telah menetapkan standar perlunya integrasi hasil penelitian dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat?
a. Belum [0]
b. Sudah [5]
(Dokumen mohon dilampirkan)
5. Apakah jurusan/program studi telah mendorong sivitas akademika melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat?
a. Belum [0]
b. Sudah [5]
(Dokumen mohon dilampirkan)

4. Data Pendukung

Nama Fakultas :
Nama Program Studi :
Jenjang :

1a. Penerimaan Mahasiswa Baru (hanya untuk semester ganjil dan diisikan dengan jumlah)

Peminat :
Daya tampung :
Lulus seleksi :
Mendaftar kembali :

1b. Mahasiswa dan Lulusan (diisikan dengan jumlah)

Mahasiswa Berstatus Aktif Seluruhnya:

Mahasiswa Angkatan TS-1 :
Mahasiswa lulus tepat waktu : (hanya untuk pengisian EVISEM bukan Oktober)
Mahasiswa Putus Studi :
Mahasiswa yang Menulis Tugas Akhir:
Mahasiswa yang menulis Tugas Akhir dalam payung penelitian:
Mahasiswa yang Lulus :

2. Indeks Prestasi dan Masa Studi (diisikan dengan rerata)

IP Seluruh Mahasiswa (termasuk lulusan) :

IP Mahasiswa per Angkatan per Semester :

Angkatan T

Angkatan T-1

Angkatan T-2

Angkatan T-3

Angkatan T-4

IPK Lulusan :
Lama Lulusan Menyelesaikan Tugas Akhir : (dalam semester)
Masa Studi Lulusan : (dalam semester)

3. Mata Kuliah (diisikan dengan jumlah)

Mata Kuliah :
Mata Kuliah yang Silabusnya diunggah :
Mata Kuliah yang memiliki Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP):
Mata Kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas $\geq 20\%$:
Mata Kuliah yang minimal 95% soal ujiannya sesuai dengan Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP)/RPP:
Mata Kuliah yang soal ujiannya diulas oleh tim yang dikoordinasikan oleh Ketua Program Studi:

4. Pemantauan, evaluasi, rekomendasi, dan tindak lanjut terhadap materi kuliah (diisikan dengan angka pilihan)

Nomor berapakah kondisi tiap program di Program Studi dalam pemantauan, evaluasi, rekomendasi, dan tindak lanjut terhadap materi ajar?

1. Belum ada pemantauan dan evaluasi.
2. Ada pemantauan, namun belum ada evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut perbaikan.
3. Ada pemantauan dan evaluasi, dan rekomendasi, namun belum dilakukan tindak lanjut perbaikan.
4. Ada pemantauan, evaluasi, dan rekomendasi, dan tindak lanjut perbaikan.

5. Dosen

5a. Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap (diisikan dengan jumlah)

Dosen seluruhnya :
Dosen Tetap :
Dosen Tidak Tetap :

5b. Dosen Pembimbing (diisikan dengan jumlah)

Dosen yang Menjadi Pembimbing Akademis:
Dosen yang menjadi Pembimbing Tugas Akhir:

5c. Jabatan Fungsional Dosen Tetap (diisikan dengan jumlah)

Dosen Tetap belum memiliki Jafung :
Dosen Tetap dengan Jafung Asisten Ahli :
Dosen Tetap dengan Jafung Lektor :
Dosen Tetap dengan Jafung Lektor Kepala :
Dosen Tetap dengan Jafung Guru Besar :

5d. Kualifikasi Dosen Tetap: Sertifikasi (diisikan dengan jumlah)

Dosen Tetap yang Sudah Tersertifikasi :
Dosen Tetap yang Belum Tersertifikasi :

5e. Kualifikasi Dosen Tetap: Kesesuaian Keahlian Dosen dengan Kompetensi Program Studi (diisikan dengan jumlah)

Dosen Tetap yang Pendidikannya (S2 atau S3) Sesuai dengan Kompetensi Program Studi:

Kinerja Dosen

6a. Tugas dan Kinerja Dosen Tetap (diisikan dengan rerata)

Beban Tugas Dosen Tetap (FTE) :
Persentase Kehadiran Dosen :
Nilai Hasil EDOM :

6b. Pemanfaatan Hasil EDOM (Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa) (diisikan dengan angka jumlah)

Dari daftar di bawah ini, berapa jumlah pemanfaatan EDOM yang dilakukan oleh Program Studi?

Pemanfaatan hasil Penghitungan EDOM:

- Perbaikan isi mata kuliah
- Perbaikan proses pembelajaran.
- Perbaikan metode evaluasi penilaian.
- Perbaikan mutu profesionalisme dosen
- Perbaikan etika dosen dalam mengajar.
- Pemberian insentif dosen.

Penelitian dan Pengabdian

7a. Penelitian Dosen yang Sesuai dengan Bidang Keilmuan Program Studi (diisikan dengan jumlah)

Jumlah Penelitian 1 (satu) Semester yang lalu :
Jumlah Penelitian 2 (dua) Semester yang lalu :
Besarnya Dana Penelitian 1 (satu) Semester yang lalu :
Besarnya Dana Penelitian 2 (dua) Semester yang lalu :

7b. Pelayanan dan Pengabdian kepada Masyarakat (diisikan dengan jumlah)

Jumlah pelayanan dan PkM 1 (satu) Semester lalu :
Jumlah pelayanan dan PkM 2 (dua) Semester yang lalu:
Besarnya Dana Pelayanan dan PkM 1 (satu) Semester yang lalu:
Besarnya Dana Pelayanan dan PkM 2 (dua) Semester yang lalu :

7c. Artikel Dosen Program Studi (diisikan dengan jumlah)

Artikel Dosen PS yang dimuat dalam Jurnal Terakreditasi Nasional 1 (satu) Semester yang lalu:
Artikel Dosen PS yang dimuat dalam Jurnal Terakreditasi Nasional 2 (dua) Semester yang lalu:

Artikel Dosen PS yang dimuat dalam Jurnal Internasional 1 (satu) Semester yang lalu:
Artikel Dosen PS yang dimuat dalam Jurnal Internasional 2 (dua) Semester yang lalu:

8. Kesertaan Konferensi dan Kekayaan Intelektual (diisikan dengan jumlah)
Kesertaan dosen tetap dalam seminar/lokakarya yang sesuai dengan keilmuan Program Studi 1 (satu) semester yang lalu :
Kesertaan dosen tetap dalam seminar/lokakarya yang sesuai dengan keilmuan Program Studi 2 (dua) semester yang lalu :
Jumlah HAKI atau surat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional yang diperoleh Program Studi 1 (dua) semester yang lalu:
Jumlah HAKI atau surat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional yang diperoleh Program Studi 2 (dua) semester yang lalu:

LAMPIRAN II. KONTEN EVALUASI TAHUNAN

1. Falsafah Evaluasi Mutu Internal

Falsafah Evaluasi Mutu Internal (EMI) antara lain:

- i. Dari, oleh, dan untuk Institut Teknologi Del.
- ii. Objektif dan jujur, data yang diperoleh berdasarkan fakta diri apa adanya.
- iii. Tidak perlu dipublikasikan ke publik karena untuk kepentingan kebijakan internal Institut Teknologi Del.
- iv. Data agregat dapat digunakan untuk kepentingan Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi yang berkaitan dengan kebijakan, pemetaan, dan profil pendidikan perguruan tinggi.
- v. Hasil EMI dapat digunakan untuk persiapan menyongsong Evaluasi Eksternal Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) ataupun Penjaminan Mutu ASEAN University Network (AUN).

Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan”, dalam Undang Undang Republik Indonesia. Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 53. Dikemukakan bahwa: “sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi meliputi 10 standar yakni: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian, penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi”.

Siklus penjaminan mutu internal pada umumnya terdiri dari:

1. penetapan standar,
2. pemenuhan standar,
3. pengukuran pencapaian standar, dan
4. pengembangan dan perbaikan standar.

Evaluasi Mutu Internal (EMI) merupakan instrumen evaluasi diri yang ditinjau secara berkala, disesuaikan dengan kondisi-kondisi internal Program Studi, praktik yang baik yang berlaku di Indonesia, serta perkembangan di dunia internasional. Data EMI adalah data dari, oleh, dan untuk Program Studi pada perguruan tinggi. Oleh karena itu, data yang diperoleh dapat menjadi penuntun Program Studi untuk melakukan evaluasi diri, menetapkan rencana tindak lanjut, perencanaan, menetapkan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta perbaikan terus-menerus untuk mencapai standar dan kriteria yang ditetapkan.

Melalui pengisian EMI Program Studi dapat mengetahui apakah mereka telah memenuhi standar nasional dan apakah mereka telah memenuhi kebutuhan peserta didik calon profesional. Karena itu, masing-masing Program Studi perlu melakukan pengisian EMI setiap setiap tahun, sehingga Program Studi dapat mempergunakan informasi yang dikumpulkan untuk mengarahkan perencanaan menuju peningkatan mutu berkelanjutan.

2. Strategi pelaksanaan Evaluasi Mutu Internal

Pelaksanaan EMI diawali dengan membentuk Tim Penjaminan Mutu Program Studi (TPM-PS). Kemudian TPM-PS melaksanakan EMI dengan mengisi instrumen EMI yang disertai bukti fisik pendukungnya. Selanjutnya TPM-PS melakukan analisis hasil EMI sampai menyusun laporan EMI. EMI dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap tahun dan

hasilnya digunakan sebagai dasar bagi perencanaan kegiatan dan pengembangan kapasitas PT menuju tercapainya atau terlampauinya 11 SNP-PT.

Mekanisme siklus kerja EMI, termasuk tugas dan tanggung jawab tim pengembang, adalah sebagai berikut:

- Perencanaan dan implementasi program peningkatan mutu;
- Pembentukan tim penjaminan mutu Program Studi;
- Pelaksanaan evaluasi diri;
- Analisis data EMI;
- Laporan dan rekomendasi;
- Identifikasi pencapaian kinerja.

Kegiatan pada setiap tahapan siklus pelaksanaan EMI diuraikan sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Penjaminan Mutu PS (TPM-PS)
Kalau belum ada, Dekan dan Ketua Program Studi membentuk tim pengembang Program Studi yang beranggotakan unsur pimpinan, pejabat fungsional, anggota Gugus Pengendalian Mutu (GPM), dan perwakilan semua unit kerja.
2. Pelaksanaan EMI
TPM-PS menggunakan instrumen EMI untuk mengumpulkan data tentang kinerja PS yang merujuk pada 11 SNP-PS dengan dimensi - komponen - indikator yang tertuang dalam instrumen EMI dengan menyertakan bukti-bukti fisik pendukung. Proses pengumpulan data melibatkan personil Program Studi.
3. Analisis Data
TPM-PS melakukan analisis hasil EMI berdasarkan pencapaian skala kinerja pada setiap indikator pada komponen yang telah ditetapkan. Untuk mempercepat dan memudahkan proses analisis data perlu menggunakan aplikasi perangkat lunak yang memadai berbasis teknologi informasi.
4. Laporan dan Rekomendasi
TPM-PS menyusun laporan EMI dan mengarsipkan bukti fisik yang digunakan dengan tertib. Selanjutnya TPM-PS membuat rekomendasi yang dijadikan sebagai dasar dalam menyusun program pengembangan Program Studi secara berkelanjutan.
5. Identifikasi Pencapaian Kinerja Program Studi
Pada laporan kinerja Program Studi, rekomendasi, dan laporan EMI mencerminkan identifikasi pencapaian kinerja Program Studi. Instrumen EMI terdiri atas 11 Standar, 19 komponen, dan 99 indikator.
6. Perencanaan dan Implementasi Program Pengembangan
TPM-PS menggunakan informasi hasil EMI untuk perbaikan kinerja Program Studi dalam pencapaian 11 SNP-PT dengan menyusun rencana pengembangan Program Studi berdasarkan hasil laporan EMI dan rekomendasinya.

3. Cara Pengisian Alat Evaluasi Mutu Internal

Cara pengisian alat evaluasi mutu internal:

- Pengisian Alat EMI PT dimulai dengan mengisi identitas PT yang bersangkutan
- Isian EMI PT mencakup 11 standar dan terdiri dari 19 komponen, dan 99 indikator.

- Seluruh indikator yang tertera pada Alat EMI berisikan pertanyaan atau pernyataan yang tertutup yang jawabannya disetarakan dengan skor 1 sampai 7.
- Kriteria yang ditetapkan untuk setiap indikator pada masing-masing komponen dapat diacu pada Rubrik Alat Evaluasi Mutu Internal Program Studi.
- Program Studi mengisi skor setiap indikator dalam masing-masing komponen sesuai dengan pentahapan yang berjalan internal di masing-masing Program Studi, dengan mengacu pada kriteria-kriteria yang tertera pada Rubrik Alat Evaluasi Mutu Internal Program Studi.
- Setelah pengisian dilakukan, Program Studi dapat memanfaatkan data evaluasi mutu internal dengan mengacu pada Pedoman Pemanfaatan Data Evaluasi Mutu Internal Program Studi.
- Data evaluasi mutu internal adalah data dari, oleh, dan untuk perguruan tinggi. Oleh karena itu, data yang diperoleh dapat menjadi penuntun Program Studi melakukan evaluasi diri, menetapkan rencana tindak lanjut, perencanaan, menetapkan pelaksanaan, monitoring-evaluasi, serta perbaikan terus-menerus untuk mencapai standar dan kriteria yang ditetapkan.
- Apabila diperlukan konsultasi atas hasil pengisian yang diperoleh termasuk rencana tindak lanjut yang diperlukan, maka Program Studi yang bersangkutan dapat melakukan koordinasi dengan Dekan dan pejabat lainnya serta pemangku kepentingan.
- Data-data juga dapat dipergunakan oleh Program Studi untuk menjadi masukan bagi pembinaan Program Studi yang bersangkutan, maupun pengembangan pendidikan tinggi secara nasional.

4. Cara Penilaian Evaluasi Mutu Internal

Skor 1 sampai 7 mengacu pada dasar pentahapan setiap indikator yang berarti sebagai berikut:

- 1 = Sama sekali tidak mencukupi, perbaikan harus segera dilakukan (*absolutely inadequate; immediate improvements must be made*);
- 2 = Tidak mencukupi, perlu perbaikan besar (*inadequate, improvements necessary*);
- 3 = Kurang mencukupi, perbaikan minor akan menjadikan butir kualitas ini mencukupi (*inadequate, but minor improvements will make it adequate*);
- 4 = Mencukupi sesuai dengan yang diharapkan (*adequate as expected*);
- 5 = Lebih dari mencukupi (*better than adequate*);
- 6 = Merupakan contoh pelaksanaan yang baik (*example of good practice*);
- 7 = Sangat baik (*excellent*).

Rasional rubrikasi dengan skala 1 sampai 7 adalah:

- Merujuk skala yang dipakai ASEAN University Network (AUN)
- Dengan skala yang lebih rinci akan mampu mengukur perubahan atau peningkatan yang lebih rinci.
- Skala 1-7 (AUN) dan bukan 0-4 (BAN PT) agar dapat mengakomodasi keberadaan data indikator sekecil apapun yang mungkin di kala BAN akan diklasifikasikan nol (0).

Cara penilaian perlu memperhatikan hal-hal berikut:

- Kriteria yang ditetapkan untuk setiap indikator pada masing-masing komponen mengacu pada Rubrik Alat EMI.
- Perguruan Tinggi mengisi skor setiap indikator untuk masing-masing komponen sesuai pentahapan yang ada di perguruan tinggi sesuai kriteria-kriteria yang tertera pada Rubrik EMI.
- Data EMI PT dapat menjadi data evaluasi mutu internal sehingga dapat memetakan pencapaian terhadap SNP, selanjutnya dibuat program pemenuhan SNP secara berkelanjutan guna mempersiapkan akreditasi BAN PT, maupun akreditasi lainnya.

5. Instrumen Evaluasi Mutu Internal Program Studi

Instrumen EMI terdiri atas 11 Standar (A. Isi, B. Proses, C. Kompetensi Lulusan, D. Pendidik dan Tenaga Kependidikan, E. Sarana dan Prasarana, F. Pengelolaan, G. Pembiayaan, H. Penilaian, I. Penelitian, J. Pengabdian Kepada Masyarakat, K. Kerjasama), 19 komponen, dan 99 indikator.

A. STANDAR ISI

1. Kurikulum	
1.1 Kejelasan dan kelengkapan dokumen kebijakan tentang penyusunan dan pengembangan kurikulum	
7	Ada dokumen yang mencakup kebijakan, peraturan, dan pedoman yang memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala kurang atau setiap 4 tahun.
6	Ada dokumen yang mencakup kebijakan, peraturan, dan pedoman yang memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala lebih dari 4 tahun.
5	Ada dokumen yang mencakup kebijakan, peraturan, tetapi tidak ada pedoman yang memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala.
4	Ada dokumen tentang kebijakan, tetapi tidak ada peraturan dan pedoman yang memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala.
3	Ada kebijakan tertulis yang memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala, tetapi belum dituangkan dalam dokumen formal.
2	Ada kebijakan tidak tertulis yang memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala.
1	Tidak ada kebijakan tertulis tentang penyusunan dan pengembangan kurikulum.
1.2 Pelibatan <i>stake-holders</i> (dosen, alumni, mahasiswa, dan pengguna) dalam penyusunan kurikulum.	
7	Penyusunan kurikulum dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dan ketua program studi dengan melibatkan dosen, mahasiswa, alumni, pengguna, dan pemerintah serta hasil <i>benchmark</i> di berbagai institusi lain.
6	Penyusunan kurikulum dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dan ketua program

	studi dengan melibatkan dosen, mahasiswa, alumni, pengguna, dan pemerintah.
5	Penyusunan kurikulum dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dan ketua program studi dengan melibatkan dosen, mahasiswa, dan alumni.
4	Penyusunan kurikulum dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dan ketua program studi dengan melibatkan dosen dan mahasiswa.
3	Penyusunan kurikulum dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dan ketua program studi dengan melibatkan dosen saja
2	Penyusunan kurikulum dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dan ketua program studi saja.
1	Penyusunan kurikulum dilakukan oleh ketua program studi saja.
1.3 Kejelasan pedoman serta dokumen implementasi monitoring dan keberkalaan evaluasi pengembangan kurikulum.	
7	Ada pedoman yang diperbaharui secara berkala, disertai dokumen analisis dan evaluasi pengembangan kurikulum program studi yang ditindaklanjuti untuk penjaminan mutu secara berkelanjutan.
6	Ada pedoman tetapi tidak diperbaharui secara berkala, disertai dokumen analisis dan evaluasi pengembangan kurikulum program studi yang ditindaklanjuti untuk penjaminan mutu secara berkelanjutan.
5	Ada pedoman tetapi tidak diperbaharui secara berkala, disertai dokumen analisis serta evaluasi pengembangan kurikulum program studi yang telah dianalisis dan dievaluasi tetapi tidak ditindaklanjuti.
4	Ada pedoman tetapi tidak diperbaharui secara berkala, disertai dokumen pengembangan kurikulum program studi tetapi tidak dianalisis , dievaluasi, juga tidak ditindaklanjuti.
3	Ada pedoman tetapi tidak diperbaharui secara berkala, disertai dokumen namun tidak lengkap sebagai dokumen analisis dan evaluasi pengembangan kurikulum program studi.
2	Ada rencana penyusunan pedoman dan dokumen implementasi monitoring serta keberkalaan evaluasi pengembangan kurikulum program studi yang terdokumentasi .
1	Tidak ada pedoman maupun dokumen implementasi monitoring kurikulum.
1.4 Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi	
7	Ada dokumen tentang kesesuaian antara kurikulum, kompetensi termasuk <i>soft skills</i> , visi, dan misi yang lengkap serta rencana implementasi kurikulum yang sistematis.
6	Ada dokumen tentang kesesuaian antara kurikulum, kompetensi, visi, dan misi yang lengkap serta rencana implementasi kurikulum yang sistematis.
5	Ada dokumen tentang kesesuaian antara kurikulum, kompetensi, visi, dan misi yang lengkap serta rencana implementasi kurikulum tetapi tidak sistematis.
4	Ada dokumen tentang kesesuaian antara kurikulum, kompetensi, visi, dan misi yang lengkap.
3	Ada dokumen tentang kesesuaian antara kurikulum, kompetensi, visi, dan misi namun tidak lengkap.
2	Tidak ada dokumen tertulis yang menyatakan kesesuaian antara kurikulum, kompetensi, visi, dan misi.
1	Tidak ada kesesuaian antara kurikulum, kompetensi, visi, dan misi institusi.
1.5 Kesesuaian kurikulum dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat.	
7	Ada dokumen lengkap yang menyatakan bahwa kurikulum sesuai dengan

	perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat serta mekanisme penyesuaian kurikulum secara berkala.
6	Ada dokumen lengkap yang menyatakan bahwa kurikulum sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat serta mekanisme penyesuaian kurikulum tetapi tidak secara berkala.
5	Ada dokumen lengkap yang menyatakan bahwa kurikulum sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat namun tidak ada mekanisme penyesuaian kurikulum.
4	Ada dokumen yang menyatakan bahwa kurikulum sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat, namun tidak lengkap.
3	Ada dokumen yang menyatakan bahwa kurikulum sesuai dengan perkembangan IPTEKS tetapi tidak lengkap dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2	Ada dokumen yang menyatakan bahwa kurikulum tidak sesuai dengan dengan perkembangan IPTEKS tetapi tidak lengkap dan tidak sesuai kebutuhan masyarakat.
1	Ada dokumen kurikulum tetapi tidak lengkap dan tidak sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat.

B. STANDAR PROSES

2. Pengembangan Mutu Pembelajaran	
2.1 Keberadaan dan fungsi unit pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, bereksplorasi, berekspresi, bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber yang hasilnya dimanfaatkan oleh institusi.	
7	Ada unit atau lembaga yang khusus berfungsi untuk mengkaji dan mengembangkan pengkajian dan pengembangan sistem serta mutu pembelajaran yang hasilnya dimanfaatkan oleh institusi sendiri dan institusi dalam dan luar negeri secara berkesinambungan.
6	Ada unit atau lembaga yang khusus berfungsi untuk mengkaji dan mengembangkan pengkajian dan pengembangan sistem serta mutu pembelajaran yang hasilnya dimanfaatkan oleh institusi sendiri dan institusi lain di dalam dan luar negeri.
5	Ada unit atau lembaga yang khusus berfungsi untuk mengkaji dan mengembangkan pengkajian dan pengembangan sistem serta mutu pembelajaran yang hasilnya dimanfaatkan oleh institusi sendiri dan institusi lain di dalam negeri.
4	Ada unit atau lembaga yang khusus berfungsi untuk mengkaji dan mengembangkan pengkajian dan pengembangan sistem serta mutu pembelajaran serta hasilnya dimanfaatkan oleh institusi sendiri.
3	Ada unit yang mengkaji dan mengembangkan pengkajian dan pengembangan sistem serta mutu pembelajaran, tetapi hasilnya tidak belum dimanfaatkan oleh institusi sendiri.
2	Ada rencana pengembangan unit yang melakukan pengkajian maupun pengembangan sistem dan mutu pembelajaran yang terdokumentasi .
1	Tidak ada memiliki unit pengkajian dan tidak melakukan pengkajian maupun

	pengembangan sistem dan mutu pembelajaran.
2.2 Kejelasan sistem pengendalian mutu pembelajaran yang diterapkan institusi termasuk proses monitoring, evaluasi, dan pemanfaatannya.	
7	Ada sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif berpusat kepada pembelajar dengan memanfaatkan beragam sumber belajar minimal mencakup pendekatan sistem pembelajaran dan pengajaran, perencanaan dan sumber daya pembelajaran, syarat kelulusan, dan yang dilaksanakan secara konsisten, dimonitor dan dievaluasi secara formatif dan sumatif secara berkala.
6	Ada sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif berpusat kepada pembelajar dengan memanfaatkan beragam sumber belajar minimal mencakup pendekatan sistem pembelajaran dan pengajaran, perencanaan dan sumber daya pembelajaran, syarat kelulusan, dan yang dilaksanakan secara konsisten, dimonitor dan dievaluasi secara formatif dengan baik.
5	Ada sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif berpusat kepada pembelajar dengan memanfaatkan beragam sumber belajar minimal mencakup pendekatan sistem pembelajaran dan pengajaran, perencanaan dan sumber daya pembelajaran, syarat kelulusan, dan yang dilaksanakan secara konsisten, dimonitor dan dievaluasi baik.
4	Ada sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif berpusat kepada pembelajar dengan memanfaatkan beragam sumber belajar minimal mencakup pendekatan sistem pembelajaran dan pengajaran, perencanaan dan sumber daya pembelajaran, syarat kelulusan, dan yang dilaksanakan secara konsisten dan dimonitor dengan baik tetapi tidak dievaluasi.
3	Ada sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif berpusat kepada pembelajar dengan memanfaatkan beragam sumber belajar minimal mencakup pendekatan sistem pembelajaran dan pengajaran, perencanaan dan sumber daya pembelajaran, syarat kelulusan, dan yang dan pelaksanaannya konsisten tetapi tidak dimonitor dan tidak dievaluasi.
2	Ada sistem yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif berpusat kepada pembelajar dengan memanfaatkan beragam sumber belajar minimal mencakup pendekatan sistem pembelajaran dan pengajaran, perencanaan dan sumber daya pembelajaran, syarat kelulusan <i>tetapi</i> pelaksanaannya tidak konsisten, tidak dimonitor dan tidak dievaluasi.
1	Tidak ada sistem pengendalian mutu pembelajaran yang menjamin penyelenggaraan proses pembelajaran yang baik.
2.3 Kejelasan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang terintegrasi dengan Tri Dharma PT yang digunakan sebagai acuan bagi perencanaan dan pelaksanaan Tri Dharma unit di bawahnya yang menjamin terintegrasinya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses	

pembelajaran.	
7	Ada pedoman yang menjadi acuan unit pelaksana yang mewajibkan pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran, serta dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit dan ditingkatkan terus-menerus.
6	Ada pedoman yang menjadi acuan unit pelaksana yang mewajibkan pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran, serta telah dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.
5	Ada pedoman yang menjadi acuan unit pelaksana yang mewajibkan pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran, serta telah dilaksanakan secara konsisten di sebagian unit.
4	Ada pedoman yang menjadi acuan unit pelaksana yang mewajibkan pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran, namun pelaksanaannya masih belum konsisten di seluruh unit.
3	Ada pedoman yang menjadi acuan unit pelaksana tetapi tidak mewajibkan pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran.
2	Ada pedoman yang menjadi acuan unit pelaksana tetapi tidak lengkap dan tidak diintegrasikan.
1	Tidak memiliki pedoman pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi yang digunakan sebagai acuan bagi perencanaan dan pelaksanaan program Tri Dharma unit di bawahnya yang menjamin terintegrasinya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran.
2.4 Kebijakan tentang penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi pembelajaran serta pengembangan karakter mahasiswa.	
7	Ada kebijakan penetapan konsep pendidikan, pengajaran dan strategi pembelajaran yang diimplementasikan pada seluruh unit dengan evaluasi secara berkala.
6	Ada kebijakan penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi pembelajaran yang diimplementasikan pada seluruh unit yang ada tetapi tidak dievaluasi secara berkala.
5	Ada kebijakan penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi pembelajaran yang diimplementasikan pada sebagian besar (70-99%) unit yang ada.
4	Ada kebijakan penetapan konsep pendidikan, pengajaran dan strategi pembelajaran yang diimplementasikan pada sebagian (35-69%) unit yang ada.
3	Ada kebijakan penetapan konsep pendidikan, pengajaran dan strategi pembelajaran yang diimplementasikan pada sebagian kecil (<35%) unit yang ada.
2	Ada kebijakan penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi pembelajaran

	tetapi belum diimplementasikan.
1	Belum ada penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi pembelajaran.
2.5 Prosentase penerapan metode pembelajaran yang mempergunakan pendekatan <i>student-centered learning</i> dari seluruh program studi.	
7	Penerapan metode pembelajaran yang menerapkan pendekatan 85-100% <i>student centered learning</i> yang dilakukan dari seluruh program studi dengan berbagai pengembangan penerapannya.
6	Penerapan metode pembelajaran yang menerapkan pendekatan 70-84% <i>student centered learning</i> yang dilakukan dari seluruh program studi dengan berbagai pengembangan penerapannya.
5	Penerapan metode pembelajaran yang menerapkan pendekatan 50-69% <i>student centered learning</i> yang dilakukan dari seluruh program studi dengan berbagai pengembangan penerapannya.
4	Penerapan metode pembelajaran yang menerapkan pendekatan 30-49% <i>student centered learning</i> yang dilakukan dari seluruh program studi dengan berbagai pengembangan penerapannya.
3	Penerapan metode pembelajaran yang menerapkan pendekatan 10-29% <i>student centered learning</i> yang dilakukan dari seluruh program studi dengan berbagai pengembangan penerapannya.
2	Penerapan metode pembelajaran yang menerapkan pendekatan <10% <i>student centered learning</i> yang dilakukan dari seluruh program studi dengan berbagai pengembangan penerapannya.
1	Belum ada metode pembelajaran yang secara khusus dikembangkan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.
2.6 Tingkat integrasi pelaksanaan program dan kegiatan akademik dalam pelaksanaan Tri Dharma PT.	
7	Ada program integrasi kegiatan akademik dengan pelaksanaan Tri Dharma yang diimplementasikan secara rutin dengan melibatkan perguruan tinggi lain baik dalam dan luar negeri.
6	Ada program intergrasi kegiatan akademik dengan pelaksanaan Tri Dharma yang diimplementasikan secara rutin dengan melibatkan perguruan tinggi lain di dalam negeri.
5	Ada program integrasi kegiatan akademik dengan pelaksanaan Tri Dharma dan sudah diimplementasikan secara rutin pada internal perguruan tinggi.
4	Ada program integrasi kegiatan akademik dengan pelaksanaan Tri Dharma namun diimplementasikan belum secara rutin pada internal perguruan tinggi.
3	Ada program integrasi kegiatan akademik dengan pelaksanaan Tri Dharma namun belum diimplementasikan pada internal perguruan tinggi.
2	Belum ada integrasi kegiatan akademik dengan pelaksanaan Tri Dharma.
1	Belum ada integrasi kegiatan akademik dengan pelaksanaan Tri Dharma.

2.7 Tingkat pelibatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu dari luar PT sendiri untuk peningkatan mutu pembelajaran.	
7	Setiap semester ada pelibatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan pembelajaran baik dari dalam maupun luar negeri tetapi tidak terprogram.
6	Setiap tahun ada pelibatan tenaga ahli /pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan pembelajaran baik dari dalam maupun luar negeri.
5	Dalam 2 tahun terakhir ada pelibatan tenaga ahli /pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan pembelajaran baik dari dalam maupun luar negeri.
4	Ada rencana pelibatan tenaga ahli /pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan pembelajaran baik dari dalam maupun luar negeri yang terdokumentasi.
3	Ada rencana pelibatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan pembelajaran dari dalam negeri yang terdokumentasi.
2	Belum pernah melibatkan tenaga ahli/pakar dari dalam maupun luar negeri.
1	Belum pernah melibatkan tenaga ahli/pakar dari dalam maupun luar negeri.
3. Suasana Akademik	
3.1 Kejelasan dokumen kebijakan formal tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan serta konsistensi pelaksanaannya.	
7	Ada dokumen kebijakan formal yang lengkap mencakup informasi tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit.
6	Ada dokumen kebijakan formal yang lengkap mencakup informasi tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di sebagian besar unit.
5	Ada dokumen kebijakan formal yang lengkap mencakup informasi tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di sebagian kecil unit.
4	Ada dokumen kebijakan formal yang lengkap mencakup informasi tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik belum dilaksanakan.
3	Ada dokumen kebijakan formal yang tidak lengkap mencakup informasi tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik belum dilaksanakan.
2	Belum ada dokumen kebijakan tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik.
1	Belum ada dokumen kebijakan tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik.
3.2 Kejelasan sistem pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi mahasiswa untuk meraih prestasi akademik yang maksimal.	
7	Ada sistem pengembangan suasana akademik dalam bentuk kebijakan dan strategi, program implementasi yang terjadwal, pengerahan sumber daya, monitoring dan evaluasi serta ada tindak lanjut untuk langkah perbaikan secara berkelanjutan di sebagian besar unit.
6	Ada sistem pengembangan suasana akademik dalam bentuk kebijakan dan strategi, program implementasi yang terjadwal, pengerahan sumber daya, monitoring dan evaluasi serta ada tindak lanjut untuk langkah perbaikan secara berkelanjutan di sebagian kecil unit.

5	Ada sistem pengembangan suasana akademik dalam bentuk adanya kebijakan dan strategi, program implementasi yang terjadwal, pengerahan sumber daya, monitoring dan evaluasi, tetapi tidak ada tindak lanjut untuk langkah perbaikan secara berkelanjutan.
4	Ada sistem pengembangan suasana akademik yang masih parsial dalam bentuk kebijakan dan strategi, program implementasi yang terjadwal, pengerahan sumber daya, monitoring dan evaluasi dan tindak lanjut untuk langkah perbaikan secara berkelanjutan.
3	Ada sistem pengembangan suasana akademik yang masih parsial dalam bentuk kebijakan dan strategi, program implementasi yang terjadwal, pengerahan sumber daya, monitoring dan evaluasi dan tidak ada tindak lanjut untuk langkah perbaikan secara berkelanjutan.
2	Belum ada sistem pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi mahasiswa untuk meraih prestasi akademik yang maksimal.
1	Belum ada sistem pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi mahasiswa untuk meraih prestasi akademik yang maksimal.
3.3 Upaya PT mengembangkan kegiatan kemahasiswaan, pusat olah raga, seni dan budaya bagi mahasiswa.	
7	PT mempunyai pusat olah raga, seni dan budaya bagi mahasiswa yang aktif dengan aktivitas rutin dan ada reputasi di level nasional dan internasional.
6	PT mempunyai pusat olah raga, seni dan budaya bagi mahasiswa dengan aktivitas rutin dan ada reputasi nasional.
5	PT mempunyai pusat olah raga, seni dan budaya bagi mahasiswa dengan aktivitas rutin belum ada reputasi nasional.
4	PT mempunyai pusat olah raga, seni dan budaya bagi mahasiswa dengan aktivitas yang belum rutin.
3	PT mempunyai pusat olah raga, seni dan budaya bagi mahasiswa tetapi tidak ada aktivitas.
2	PT baru merencanakan pengembangan pusat olah raga, seni dan budaya.
1	PT belum merencanakan pengembangan pusat olah raga, seni dan budaya.

C. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

4. Kelulusan Mahasiswa	
4.1 Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri untuk semua program studi.	
7	Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri untuk semua program studi <5%.
6	Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri untuk semua program studi 5-<10%.
5	Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri untuk semua program studi 10-<15%.
4	Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri untuk semua program studi 15-<20%.
3	Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri untuk semua program studi 20-<25%.
2	Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri untuk semua program studi 25-<30%.
1	Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri untuk semua program studi >30%.

4.2 Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua program studi.	
7	Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua program studi >50%.
6	Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua program studi 40%-50%.
5	Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua program studi 30-<40%.
4	Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua program studi 20-<30%.
3	Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua program studi 10-<20%.
2	Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua program studi <10%.
1	Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua program studi 0%.
4.3 Rata-rata lama studi lulusan dalam tiga tahun terakhir.	
7	Rata-rata lama studi lulusan dalam tiga tahun terakhir 4 tahun (S1) atau 3 tahun (D3).
6	Rata-rata lama studi lulusan dalam tiga tahun terakhir 4,0-<4,5 tahun (S1) atau 3-<3,7 tahun (D3).
5	Rata-rata lama studi lulusan dalam tiga tahun terakhir 4,5-<5,0 tahun (S1) atau 3,7-<4,0 tahun (D3).
4	Rata-rata lama studi lulusan dalam tiga tahun terakhir 5,0-<5,5 tahun (S1) atau 4,0-<4,3 tahun (D3).
3	Rata-rata lama studi lulusan dalam tiga tahun terakhir 5,5-<6,0 tahun (S1) atau 4,3-<4,6 tahun (D3).
2	Rata-rata lama studi lulusan dalam tiga tahun terakhir 6,0-<6,5 tahun (S1) atau 4,6-<5,0 tahun (D3).
1	Rata-rata lama studi lulusan dalam tiga tahun terakhir > 7 tahun.
4.4 Sistem evaluasi kelulusan yang tepat waktu dan memenuhi kompetensi, mencakup kebijakan dan strategi, keberadaan instrumen, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjutnya.	
7	Sistem evaluasi kelulusan yang tepat waktu dan memenuhi kompetensi mencakup kebijakan dan strategi dan komitmen institusi untuk mendorong seluruh program studi melakukan proses pelacakan dan evaluasi lulusan, instrumen yang sah dan andal disesuaikan dengan kondisi perguruan tinggi, monitoring dan evaluasi keefektifan proses pelacakan dan pemberdayaan lulusan, tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
6	Sistem evaluasi kelulusan yang tepat waktu dan memenuhi kompetensi parsial mencakup kebijakan dan strategi dan komitmen institusi untuk mendorong seluruh program studi melakukan proses pelacakan dan evaluasi lulusan, instrumen yang sah dan andal disesuaikan dengan kondisi perguruan tinggi, monitoring dan evaluasi keefektifan proses pelacakan dan pemberdayaan lulusan, tetapi tidak ada tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
5	Sistem evaluasi kelulusan yang tepat waktu dan memenuhi kompetensi hanya parsial atau hanya mencakup tiga di antara elemen berikut kebijakan dan strategi dan komitmen institusi untuk mendorong seluruh program studi melakukan proses pelacakan dan evaluasi lulusan, instrumen yang sah dan andal disesuaikan dengan kondisi perguruan tinggi, monitoring dan evaluasi keefektifan proses pelacakan dan pemberdayaan lulusan, tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
4	Sistem evaluasi kelulusan yang tepat waktu dan memenuhi kompetensi hanya parsial atau hanya mencakup dua di antara elemen berikut kebijakan dan strategi dan komitmen institusi untuk mendorong seluruh program studi melakukan proses pelacakan dan evaluasi lulusan, instrumen yang sah dan andal disesuaikan dengan kondisi perguruan tinggi, monitoring dan evaluasi keefektifan proses pelacakan dan pemberdayaan lulusan,

	tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
3	Sistem evaluasi kelulusan yang tepat waktu dan memenuhi kompetensi hanya parsial atau hanya mencakup satu di antara elemen berikut kebijakan dan strategi dan komitmen institusi untuk mendorong seluruh program studi melakukan proses pelacakan dan evaluasi lulusan, instrumen yang sah dan andal disesuaikan dengan kondisi perguruan tinggi, monitoring dan evaluasi keefektifan proses pelacakan dan pemberdayaan lulusan, tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
2	PT sedang menyusun sistem evaluasi kelulusan yang tepat waktu dan memenuhi kompetensi.
1	Belum adanya sistem evaluasi kelulusan yang tepat waktu dan memenuhi kompetensi.
4.5 Rasio total alumni dalam lima tahun terakhir yang memberikan respon terhadap studi pelacakan.	
7	Rasio alumni dalam lima tahun terakhir yang memberikan respon terhadap studi pelacakan >50%.
6	Rasio alumni dalam lima tahun terakhir yang memberikan respon terhadap studi pelacakan 40-<50%.
5	Rasio alumni dalam lima tahun terakhir yang memberikan respon terhadap studi pelacakan 30-<40%.
4	Rasio alumni dalam lima tahun terakhir yang memberikan respon terhadap studi pelacakan 25-<30%.
3	Rasio alumni dalam lima tahun terakhir yang memberikan respon terhadap studi pelacakan 20-<25%.
2	Rasio alumni dalam lima tahun terakhir yang memberikan respon terhadap studi pelacakan 10-<20%.
1	Rasio alumni dalam lima tahun terakhir yang memberikan respon terhadap studi pelacakan <10%.
4.6 Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan PT dalam bentuk sumbangan dana sumbangan fasilitas dan masukan untuk perbaikan proses pembelajaran dan pengembangan jejaring.	
7	>25% dari jumlah total alumni terdata telah berpartisipasi dalam memberikan sumbangan dana, sumbangan fasilitas, dan masukan untuk perbaikan proses pembelajaran dan pengembangan jejaring.
6	20-25% dari jumlah total alumni terdata telah berpartisipasi dalam memberikan sumbangan dana, sumbangan fasilitas, dan masukan untuk perbaikan proses pembelajaran dan pengembangan jejaring.
5	15-<20% dari jumlah total alumni terdata telah berpartisipasi dalam memberikan sumbangan dana, sumbangan fasilitas, dan masukan untuk perbaikan proses pembelajaran dan pengembangan jejaring.
4	10-<15% dari jumlah total alumni terdata telah berpartisipasi dalam memberikan sumbangan dana, sumbangan fasilitas, dan masukan untuk perbaikan proses pembelajaran dan pengembangan jejaring.
3	5-<10% dari jumlah total alumni terdata telah berpartisipasi dalam memberikan sumbangan dana dan sumbangan fasilitas.
2	Kurang dari 5 % dari jumlah total alumni terdata telah berpartisipasi dalam memberikan sumbangan dana dan sumbangan fasilitas.
1	Belum ada alumni memberikan partisipasi dalam memberikan dana alumni dan bersifat monumental.
4.7 Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan yang pertama.	

7	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama <3 bulan.
6	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama 3-6 bulan.
5	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama lebih dari 6 bulan hingga 9 bulan.
4	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama lebih dari 9 bulan hingga 12 bulan.
3	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama lebih dari 12 bulan hingga 15 bulan.
2	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama lebih dari 15 bulan hingga 18 bulan.
1	Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama >18 bulan.

4.8 Persentase lulusan yang menjadi entrepreneur dalam tiga tahun terakhir

7	> 25 % dari lulusan PT menjadi entrepreneur.
6	20-25 % dari lulusan PT menjadi entrepreneur.
5	15-<20 % dari lulusan PT menjadi entrepreneur.
4	10-<15 % dari lulusan PT menjadi entrepreneur.
3	5-<10 % dari lulusan PT menjadi entrepreneur.
2	3-<5 % dari lulusan PT menjadi entrepreneur.
1	<3 % dari lulusan PT menjadi entrepreneur.

5. Prestasi Mahasiswa

5.1 Pencapaian prestasi mahasiswa di tingkat propinsi/ wilayah, nasional, dan internasional.

7	>5% mahasiswa meraih prestasi di tingkat internasional.
6	3-5% mahasiswa meraih prestasi di tingkat internasional.
5	<3% mahasiswa meraih prestasi di tingkat internasional.
4	>10% mahasiswa meraih prestasi di tingkat nasional dan atau propinsi/wilayah.
3	5-10% mahasiswa meraih prestasi di tingkat nasional dan atau propinsi/wilayah.
2	<5% mahasiswa meraih prestasi di tingkat nasional dan atau propinsi/wilayah.
1	Tidak ada mahasiswa yang meraih prestasi baik di tingkat internasional, nasional maupun propinsi/wilayah.

5.2 Upaya institusi untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan non-akademik.

7	Adanya upaya dalam bentuk bimbingan peningkatan prestasi, pemberian bantuan dana, pemberian kesempatan untuk berpartisipasi dilakukan secara terprogram yang berkelanjutan.
6	Adanya upaya dalam bentuk bimbingan peningkatan prestasi, pemberian bantuan dana, pemberian kesempatan untuk berpartisipasi dilakukan secara terprogram.
5	Dua dari tiga upaya dalam bentuk bimbingan peningkatan prestasi, penyediaan dana, pemberian kesempatan untuk berpartisipasi, dilakukan secara terprogram, tetapi satu diantaranya bersifat parsial.
4	Satu dari tiga upaya berikut bimbingan peningkatan prestasi, pemberian bantuan dana, pemberian kesempatan untuk berpartisipasi, dilakukan secara terprogram dan konsisten.
3	Satu dari tiga upaya dalam bentuk bimbingan, peningkatan prestasi, pemberian bantuan dana, pemberian kesempatan untuk berpartisipasi dilakukan secara terprogram, tetapi belum konsisten.
2	Ada upaya dalam bentuk bimbingan, peningkatan prestasi, pemberian bantuan dana, pemberian kesempatan untuk berpartisipasi tetapi tidak terprogram.
1	Belum ada upaya untuk memberi bimbingan, peningkatan prestasi, pemberian bantuan

	dana, dan pemberian kesempatan.
--	---------------------------------

D. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

6. Ketersediaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan	
6.1 Ketersediaan tenaga pendidik yang memenuhi perundangan.	
7	1:<31 (eksakta) atau 1:<100 (sosial).
6	1:30-35 (eksakta) atau 1:100-125(sosial).
5	1:35-40 (eksakta) atau 1:125-150(sosial).
4	1:40-45 (eksakta) atau 1:150-175(sosial).
3	1:45-50(eksakta) atau 1:175-200(sosial).
2	1:50-55(eksakta) atau 1:200-225 (sosial).
1	1:> 55 (eksakta) atau 1:>225 (sosial).
6.2 Ketersediaan tenaga kependidikan.	
7	Rasio tenaga kependidikan dan mahasiswa 1:<100.
6	Rasio tenaga kependidikan dan mahasiswa 1:<100-150.
5	Rasio tenaga kependidikan dan mahasiswa 1:<150-200.
4	Rasio tenaga kependidikan dan mahasiswa 1:<200-250.
3	Rasio tenaga kependidikan dan mahasiswa 1:<250-300.
2	Rasio tenaga kependidikan dan mahasiswa 1:<300-350.
1	Rasio tenaga kependidikan dan mahasiswa 1:<350.
6.3 Ketersediaan sistem pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan.	
7	PT memiliki 7 pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten pada standar perencanaan, rekrutmen, seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.
6	PT memiliki 6 pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten, dari 7 standar perencanaan, rekrutmen, seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.
5	PT memiliki 5 pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten, dari 7 standar perencanaan, rekrutmen, seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.
4	PT memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan tidak ada bukti dilaksanakan secara konsisten dari standar perencanaan, rekrutmen, seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.
3	PT memiliki upaya pengembangan tenaga dosen tetap dan tenaga kependidikan dan cukup baik, namun dukungan dana dari pihak institusi masih kurang, sehingga kurang memotivasi dosen dan tenaga kependidikan.
2	PT memiliki upaya dan komitmen institusi dalam pengembangan tenaga dosen dan tenaga kependidikan dan, tidak ada dukungan dana.
1	PT belum memiliki upaya pengembangan, padahal jumlah dosen dan tenaga kependidikan masih belum memadai.
6.4 Ketersediaan pedoman dan dokumen implementasi tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.	
7	PT memiliki 3 pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/

	pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.
6	PT memiliki 2 pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen dari 3 bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.
5	PT memiliki 1 pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen dari 3 bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.
4	PT memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti belum dilaksanakan secara Konsisten.
3	PT memiliki pedoman tertulis yang lengkap; tetapi tidak dilaksanakan.
2	PT memiliki pedoman tertulis, tidak lengkap dan belum dilaksanakan.
1	PT belum memiliki dan dokumen implementasi tentang sistem monitoring dan evaluasi.

E. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

7. Ketersediaan Sarana Pendidikan	
7.1 Kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas termasuk ketersediaan dan memudahkan akses <i>e-library</i> untuk setiap bahan pustaka yang meliputi buku teks, jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan prosiding.	
7	Tersedia koleksi perpustakaan, aksesibilitas mencakup <i>e-library</i> untuk setiap bahan pustaka berikut: (A) Buku teks dan perlengkapannya, (B) Skripsi, tesis, disertrasi, (C) Jurnal nasional belum terakreditasi, (D) Jurnal nasional terakreditasi, (E) Prosiding nasional/internasional (F) Jurnal international dengan sangat memadai untuk semua program studi.
6	Tersedia koleksi perpustakaan, aksesibilitas mencakup <i>e-library</i> untuk A, B, C, D, E, dan F memadai untuk sebagian besar program studi.
5	Tersedia koleksi perpustakaan, aksesibilitas mencakup <i>e-library</i> untuk A, B, C, D, dan E memadai untuk sebagian besar program studi.
4	Tersedia koleksi perpustakaan, aksesibilitas mencakup <i>e-library</i> untuk A, B, C, dan D memadai untuk sebagian besar program studi.
3	Tersedia koleksi perpustakaan, aksesibilitas mencakup <i>e-library</i> untuk A, B, dan C memadai untuk sebagian besar program studi.
2	Tersedia koleksi perpustakaan, aksesibilitas mencakup <i>e-library</i> untuk A dan B memadai untuk sebagian besar program studi.
1	Tersedia koleksi perpustakaan, tetapi belum menggunakan e-library.
7.2 Angka efisiensi dan ketersediaan, akses, dan pendayagunaan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran seperti tempat praktikum, bengkel/studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, <i>green house</i>, lahan untuk pertanian, dan sejenisnya.	
7	Ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran dan akses penggunaan sarana dan prasarana “sangat memadai” (>75%) mencakup: A. Tempat praktikum, B. Bengkel/Studio, C. Ruang simulasi, D.Rumah Sakit/balai kesehatan/poliklinik, dan E. <i>Green house</i> dan sejenisnya.
6	Ketersediaan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran dan akses penggunaan “memadai” (sampai dengan 75%) penggunaan mencakup: A. Tempat

	praktikum, B. Bengkel/Studio, C. Ruang simulasi, D. Rumah Sakit/balai kesehatan/poliklinik, dan E. <i>Green house</i> dan sejenisnya.
5	Ketersediaan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran dan akses penggunaan “memadai” (sampai dengan 50%) mencakup: A. Tempat praktikum, B. Bengkel/Studio, C. Ruang simulasi, D. Rumah Sakit/balai kesehatan/poliklinik, dan E. <i>Green house</i> dan sejenisnya.
4	Ketersediaan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran dan akses penggunaan “belum memadai” (< 25%) mencakup: A. Tempat praktikum, B. Bengkel/Studio, C. Ruang simulasi, D. Rumah Sakit/balai kesehatan/poliklinik, dan E. <i>Green house</i> dan sejenisnya.
3	Ketersediaan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran dan akses penggunaan “kurang memadai” (sampai dengan 50%) mencakup: A. Tempat praktikum, B. Bengkel/Studio, C. Ruang simulasi dan E. <i>Green house</i> dan sejenisnya.
2	Ketersediaan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran dan akses penggunaan “memadai” (sampai dengan 50%) mencakup: A. Tempat praktikum, B. Bengkel/Studio, dan C. Ruang simulasi.
1	Ketersediaan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran dan akses penggunaan “kurang memadai” (sampai dengan 25%) mencakup: A. Tempat praktikum dan B. Bengkel/Studio.
7.3 Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang berupa ruang serba guna, tempat olah raga, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik, ruang ibadah/doa, green area, fasilitas difable dan ruang bimbingan dan konseling.	
7	Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana mencakup: (1) ruang serba guna, (2) tempat olahraga, (3) ruang himpunan mahasiswa, (4) poliklinik, (5) ruang ibadah/doa, (6) <i>green area</i> , (7) fasilitas <i>difable</i> , (8) ruang bimbingan dan konseling, dan (9) lainnya.
6	Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai mencakup 7-8 dari: (1) ruang serba guna, (2) tempat olah raga, (3) ruang himpunan mahasiswa, (4) poliklinik, (5) ruang ibadah/doa, (6) <i>green area</i> , (7) fasilitas <i>difable</i> , (8) ruang bimbingan dan konseling, dan (9) lainnya.
5	Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai mencakup 5-6 dari: (1) ruang serba guna, (2) tempat olah raga, (3) ruang himpunan mahasiswa, (4) poliklinik, (5) ruang ibadah/doa, (6) <i>green area</i> , (7) fasilitas <i>difable</i> , (8) ruang bimbingan dan konseling, dan (9) lainnya.
4	Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai mencakup 4 dari: (1) ruang serba guna, (2) tempat olah raga, (3) ruang himpunan mahasiswa, (4) poliklinik, (5) ruang ibadah/doa, (6) <i>green area</i> , (7) fasilitas <i>difable</i> , (8) ruang bimbingan dan konseling, dan (9) lainnya.
3	Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai mencakup 3 dari: (1) ruang serba guna, (2) tempat olah raga, (3) ruang himpunan mahasiswa, (4) poliklinik, (5) ruang ibadah/doa, (6) <i>green area</i> , (7) fasilitas <i>difable</i> , (8) ruang bimbingan dan konseling, dan (9) lainnya.
2	Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai mencakup 1-2 dari: (1) ruang serba guna, (2) tempat olah raga, (3) ruang himpunan mahasiswa, (4) poliklinik, (5) ruang ibadah/doa, (6) <i>green area</i> , (7) fasilitas <i>difable</i> , (8) ruang bimbingan dan konseling, dan (9) lainnya.
1	Belum tersedianya fasilitas sarana dan prasarana seperti daftar di atas.
8. Ketersediaan Sistem Informasi	

8.1 Ketersediaan sistem informasi dan fasilitas TIK yang digunakan PT dalam proses pembelajaran dalam bentuk band width, hardware, software, e-learning, dan on-line journal/library, dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas.	
7	Ketersediaan TIK mencakup: 1. <i>bandwidth dan hardware</i> , 2. <i>software</i> , 3. <i>e-learning</i> , 4. <i>e-library</i> dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas dari keempat fasilitas TIK yang dimaksudkan.
6	Ketersediaan TIK mencakup: 1. <i>bandwidth dan hardware</i> , 2. <i>software</i> , 3. <i>e-learning</i> , 4. <i>e-library</i> dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas dari keempat fasilitas TIK yang dimaksudkan.
5	Ketersediaan TIK mencakup: 1. <i>bandwidth dan hardware</i> , 2. <i>software</i> , 3. <i>e-learning</i> , 4. <i>e-library</i> dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas dari keempat fasilitas TIK yang dimaksudkan.
4	Ketersediaan TIK mencakup: 1. <i>bandwidth dan hardware</i> , 2. <i>software</i> , 3. <i>e-learning</i> , 4. <i>e-library</i> dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas dari keempat fasilitas TIK yang dimaksudkan.
3	Ketersediaan TIK mencakup: 1. <i>band width dan hardware</i> , 2. <i>software</i> , 3. <i>e-learning</i> , 4. <i>e-library</i> dengan tidak ada pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas.
2	Ketersediaan TIK mencakup: 1. <i>band width dan hardware</i> , 2. <i>software</i> , 3. <i>e-learning</i> , 4. <i>e-library</i> dengan tidak ada pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas.
1	Ketersediaan TIK mencakup: 1. <i>band width dan hardware</i> , 2. <i>software</i> , 3. <i>e-learning</i> , 4. <i>e-library</i> dengan tidak ada pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas.
8.2 Penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi akademik dan non-akademik yang mencakup hardware dan software.	
7	Penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi untuk: 1. Proses Perkuliahan, 2. Administrasi Akademik, 3. Administrasi Umum, 4. Administrasi keuangan, 5. Pengelolaan Sarana dan prasarana, dan 6. Kerjasama.
6	Penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi untuk 5 di antara 6 dari daftar.
5	Penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi untuk 4 di antara 6 dari daftar.
4	Penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi untuk 3 di antara 6 dari daftar.
3	Penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi untuk 2 di antara 6 dari daftar.
2	Penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi untuk 1 di antara 6 dari daftar.
1	Sistem informasi dalam administrasi belum satupun digunakan dan belum ada rencana pengembangan.
8.3 Ketersediaan kapasitas internet dengan rasio bandwidth per mahasiswa yang memadai.	
7	Kapasitas internet dengan rasio <i>bandwidth</i> > 25 kbps per mahasiswa.
6	Kapasitas internet dengan rasio <i>bandwidth</i> 15-25 kbps per mahasiswa.
5	Kapasitas internet dengan rasio <i>bandwidth</i> 5-<25 kbps per mahasiswa.
4	Kapasitas internet dengan rasio <i>bandwidth</i> 1-<5 kbps per mahasiswa.
3	Kapasitas internet dengan rasio <i>bandwidth</i> 0,5-<1 kbps per mahasiswa.
2	Kapasitas internet dengan rasio <i>bandwidth</i> <0,5 kbps per mahasiswa.
1	Belum ada fasilitas internet.
8.4 Aksesibilitas data dalam sistem informasi.	
7	Data dikelola dengan komputer yang sangat terintegrasi, serta dapat diakses melalui

	jaringan internet.
6	Data dikelola dengan komputer yang terintegrasi, serta dapat diakses melalui jaringan internet.
5	Data dikelola dengan komputer, serta dapat diakses melalui jaringan luas internet (<i>Wide Area Network</i> , WAN).
4	Data dikelola dengan komputer, serta dapat diakses melalui jaringan lokal (<i>Local Area Network</i> , LAN).
3	Data dikelola dengan komputer tanpa jaringan.
2	Data dikelola secara manual.
1	Belum ada penanganan data.
8.5 Blue print pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengamanan sistem informasi yang lengkap.	
7	<i>Blue print</i> pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan, dan pengamanan sistem informasi sangat lengkap, mengimplementasikan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan akses informasi yang sangat cepat didukung pendanaan yang sangat memadai.
6	<i>Blue print</i> pengembangan dan pengelolaan sangat lengkap, pemanfaatan, dan pengamanan sistem informasi, mengimplementasikan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan akses informasi yang sangat cepat didukung pendanaan yang memadai.
5	<i>Blue print</i> pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan sistem informasi, dan pengamanan sudah memperhitungkan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan akses informasi yang cepat didukung dengan pendanaan yang memadai.
4	<i>Blue print</i> pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan sistem informasi, dan pengamanan sudah memperhitungkan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan akses informasi yang cepat, namun masih terbatas dengan pendanaan.
3	<i>Blue print</i> pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi, dan pengamanan cukup sesuai dengan kebutuhan saat ini.
2	<i>Blue print</i> pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi, dan pengamanan belum jelas.
1	Belum tersedia <i>Blue print</i> pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi, dan pengamanan.

F. STANDAR PENGELOLAAN

9. Tata Pamong	
9.1 Kelengkapan dan kejelasan tata organisasi yang memungkinkan implementasi secara konsisten.	
7	PT memiliki kelengkapan dan keefektifan, serta dokumentasi struktur organisasi yang meliputi 8 dari 9 organ dan dilengkapi dengan deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang menyangkut (1) struktur organisasi, (2) pimpinan institusi (3) senat perguruan tinggi/senat akademik, (4) satuan pengawasan, (5) dewan pertimbangan, (6) pelaksana kegiatan akademik, (7) pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung, (8) pelaksana penjaminan mutu, (9) unit perencanaan dan pengembangan Tri Dharma.
6	PT memiliki kelengkapan dan keefektifan, serta dokumentasi struktur organisasi yang

	meliputi 7 dari 9 organ dan dilengkapi dengan deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang menyangkut (1) struktur organisasi, (2) pimpinan institusi (3) senat perguruan tinggi/senat akademik, (4) satuan pengawasan, (5) dewan pertimbangan, (6) pelaksana kegiatan akademik, (7) pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung, (8) pelaksana penjaminan mutu, (9) unit perencana dan pengembangan Tri Dharma.
5	PT memiliki kelengkapan dan keefektifan, serta dokumentasi struktur organisasi yang meliputi 6 dari 9 organ dan dilengkapi dengan deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang menyangkut (1) struktur organisasi, (2) pimpinan institusi (3) senat perguruan tinggi/senat akademik, (4) satuan pengawasan, (5) dewan pertimbangan, (6) pelaksana kegiatan akademik, (7) pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung, (8) pelaksana penjaminan mutu, (9) unit perencana dan pengembangan Tri Dharma.
4	PT memiliki kelengkapan dan keefektifan, serta dokumentasi struktur organisasi yang meliputi 5 dari 9 organ dan dilengkapi dengan deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang menyangkut (1) struktur organisasi, (2) pimpinan institusi (3) senat perguruan tinggi/senat akademik, (4) satuan pengawasan, (5) dewan pertimbangan, (6) pelaksana kegiatan akademik, (7) pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung, (8) pelaksana penjaminan mutu, (9) unit perencana dan pengembangan Tri Dharma.
3	PT memiliki kelengkapan dan keefektifan, serta dokumentasi struktur organisasi yang meliputi 4 dari 9 organ dan dilengkapi dengan deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang menyangkut (1) struktur organisasi, (2) pimpinan institusi (3) senat perguruan tinggi/senat akademik, (4) satuan pengawasan, (5) dewan pertimbangan, (6) pelaksana kegiatan akademik, (7) pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung, (8) pelaksana penjaminan mutu, (9) unit perencana dan pengembangan Tri Dharma.
2	PT memiliki kelengkapan dan keefektifan, serta dokumentasi struktur organisasi yang meliputi 3 dari 9 organ dan dilengkapi dengan deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang menyangkut (1) struktur organisasi, (2) pimpinan institusi (3) senat perguruan tinggi/senat akademik, (4) satuan pengawasan, (5) dewan pertimbangan, (6) pelaksana kegiatan akademik, (7) pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung, (8) pelaksana penjaminan mutu, (9) unit perencana dan pengembangan Tri Dharma.
1	PT belum memiliki kelengkapan organ dan keefektifan, serta dokumentasi struktur organisasi.

10. Kepemimpinan

10.1 Karakteristik kepemimpinan yang efektif.

7	Kepemimpinan perguruan tinggi memiliki tiga karakteristik berikut, yaitu (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi, (3) kepemimpinan publik dan memiliki pedoman, serta ada bukti efektivitas kepemimpinan.
6	Kepemimpinan perguruan tinggi memiliki tiga karakteristik berikut, (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi, (3) kepemimpinan publik dan memiliki pedoman, tetapi tidak ada bukti efektivitas kepemimpinan.
5	Kepemimpinan perguruan tinggi memiliki tiga dari tiga karakteristik berikut, yaitu (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi, (3) kepemimpinan publik tidak memiliki pedoman, tetapi ada bukti efektivitas kepemimpinan.
4	Kepemimpinan perguruan tinggi memiliki dua dari tiga karakteristik berikut, yaitu (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi, (3) kepemimpinan publik dan memiliki pedoman dan ada bukti efektivitas kepemimpinan.

3	Kepemimpinan perguruan tinggi memiliki dua dari tiga karakteristik berikut, yaitu (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi, (3) kepemimpinan publik dan memiliki pedoman, tetapi tidak ada bukti efektivitas kepemimpinan.
2	Kepemimpinan perguruan tinggi memiliki satu dari tiga karakteristik berikut, yaitu (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi, (3) kepemimpinan publik dan memiliki pedoman dan ada bukti efektivitas kepemimpinan.
1	Kepemimpinan perguruan tinggi memiliki satu dari tiga karakteristik berikut, yaitu (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi, (3) kepemimpinan publik dan memiliki pedoman, tetapi tidak ada bukti efektivitas kepemimpinan.
10.2 Kejelasan sistem pengelolaan fungsional dan operasional PT.	
7	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup lima fungsi pengelolaan (<i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling</i>) yang dilaksanakan secara efektif, dilengkapi dengan pedoman pengelolaan dan bukti berupa dokumen pengelolaan.
6	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup lima fungsi pengelolaan (<i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling</i>) yang dilaksanakan secara efektif, dilengkapi dengan pedoman pengelolaan, tetapi tanpa bukti berupa dokumen pengelolaan.
5	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup empat dari lima fungsi pengelolaan (<i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling</i>) yang dilaksanakan secara efektif, dilengkapi dengan bukti berupa dokumen pengelolaan.
4	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup empat dari lima fungsi pengelolaan (<i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling</i>) yang dilaksanakan secara efektif, tetapi tidak dilengkapi oleh pedoman pengelolaan dan tidak ada bukti dokumen pengelolaan.
3	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup tiga dari lima fungsi pengelolaan (<i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling</i>) yang dilaksanakan secara efektif, tetapi dilengkapi oleh ada bukti dokumen pengelolaan.
2	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup tiga dari lima fungsi pengelolaan (<i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling</i>) yang dilaksanakan secara efektif, tetapi tidak dilengkapi oleh pedoman pengelolaan.
1	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup dua dari lima fungsi pengelolaan (<i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling</i>) yang dilaksanakan secara efektif, tetapi tidak dilengkapi oleh pedoman pengelolaan dan tidak ada bukti dokumen pengelolaan.
11. Sistem Pengelolaan	
11.1 Kejelasan analisis jabatan, deskripsi tugas, program peningkatan kompetensi manajerial.	
7	Perguruan tinggi memiliki dokumen: (1) analisis jabatan, (2) uraian tugas, (3) prosedur kerja, (4) program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis dan (5) dokumen proses pengelolaan untuk pengelola unit kerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.
6	Perguruan tinggi memiliki 4 dari 5 aspek yaitu dokumen: (1) analisis jabatan, (2) uraian tugas, (3) prosedur kerja, (4) program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis dan (5) dokumen proses pengelolaan untuk pengelola unit kerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.
5	Perguruan tinggi memiliki 3 dari 5 aspek yaitu dokumen: (1) analisis jabatan, (2) uraian tugas, (3) prosedur kerja, (4) program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis dan (5) dokumen proses pengelolaan untuk pengelola unit kerja yang

	menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.
4	Perguruan tinggi memiliki 2 dari 5 aspek yaitu dokumen: (1) analisis jabatan, (2) uraian tugas, (3) prosedur kerja, (4) program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis dan (5) dokumen proses pengelolaan untuk pengelola unit kerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.
3	Perguruan tinggi memiliki 1 dari 5 aspek yaitu dokumen: (1) analisis jabatan, (2) uraian tugas, (3) prosedur kerja, (4) program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis dan (5) dokumen proses pengelolaan untuk pengelola unit kerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.
2	Perguruan tinggi memiliki 1 dari 5 aspek yaitu dokumen: (1) analisis jabatan, (2) uraian tugas, (3) prosedur kerja, (4) program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis dan (5) dokumen proses pengelolaan untuk pengelola unit kerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.
1	Perguruan tinggi tidak memiliki kejelasan analisis jabatan, deskripsi tugas, program peningkatan kompetensi manajerial yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif.

11.2 Diseminasi hasil kinerja PT sebagai akuntabilitas publik, serta keberkalaannya

7	Perguruan tinggi secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua <i>stakeholders</i> , minimal setiap tahun.
6	Perguruan tinggi secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua <i>stakeholders</i> , minimal setiap tiga tahun.
5	Perguruan tinggi secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua <i>stakeholders</i> , minimal setiap lima tahun.
4	Perguruan tinggi secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala minimal setiap tahun, tetapi hanya untuk internal <i>stakeholders</i> .
3	Perguruan tinggi secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala minimal tiga tahun, tetapi hanya untuk internal <i>stakeholders</i> .
2	Perguruan tinggi secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya kepada internal <i>stakeholders</i> , tetapi tidak dilakukan secara berkala.
1	Perguruan tinggi tidak menyebarluaskan hasil kinerjanya kepada <i>stakeholders</i> .

12. Seleksi Mahasiswa Baru

12.1 Sistem penerimaan mahasiswa baru yang menerapkan prinsip-prinsip ekuitas.

7	Sistem penerimaan mahasiswa baru memberikan kesempatan yang sama pada seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan atas dasar apa pun juga.
6	Sistem penerimaan mahasiswa baru memberikan kesempatan yang sama pada seluruh lapisan masyarakat dengan mempertimbangkan gender.
5	Sistem penerimaan mahasiswa baru memberikan kesempatan yang sama pada seluruh lapisan masyarakat dengan mempertimbangkan gender dan asal mahasiswa.
4	Sistem penerimaan mahasiswa baru memberikan kesempatan yang sama pada seluruh lapisan masyarakat dengan mempertimbangkan gender dan asal mahasiswa serta kemampuan finansial orang tua mahasiswa.
3	Sistem penerimaan mahasiswa baru dengan mempertimbangkan gender, asal mahasiswa, kemampuan finansial orang tua mahasiswa dan etnis.
2	Sistem penerimaan mahasiswa baru dengan mempertimbangkan gender, asal mahasiswa, kemampuan finansial orang tua mahasiswa, etnis serta kepercayaan mahasiswa.
1	Sistem penerimaan mahasiswa baru secara tertutup.

12.2 Sistem penerimaan mahasiswa baru yang menerapkan prinsip pemerataan wilayah.	
7	Sistem penerimaan mahasiswa baru memberikan kesempatan yang sama pada seluruh lapisan masyarakat dari mana pun asalnya.
6	Sistem penerimaan mahasiswa baru memberikan kesempatan yang sama pada seluruh lapisan masyarakat dari manapun asalnya dengan kuota tertentu bagi mahasiswa asing.
5	Sistem penerimaan mahasiswa baru memberikan kesempatan yang sama pada seluruh lapisan masyarakat dari manapun asalnya dengan kuota tertentu bagi mahasiswa asing dari ASEAN serta LUAR ASEAN.
4	Sistem Penerimaan mahasiswa baru memberikan kesempatan yang sama pada seluruh lapisan masyarakat dalam wilayah NKRI.
3	Sistem penerimaan mahasiswa baru mengutamakan calon dari pulau tempat perguruan tinggi berada.
2	Sistem penerimaan mahasiswa baru mengutamakan calon dari propinsi tempat perguruan tinggi berada.
1	Sistem penerimaan mahasiswa baru mengutamakan calon dari daerah tempat perguruan tinggi berada.
12.3 Tata kelola sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, sistem pengambilan keputusan dan konsistensi pelaksanaannya.	
7	Sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, sistem pengambilan keputusan dan konsistensi pelaksanaannya.
6	Sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dengan sistem pengambilan keputusan yang jelas.
5	Sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dengan sistem pengambilan keputusan yang fleksible.
4	Sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup kebijakan, kriteria, prosedur, dan instrument sitem pengambilan keputusan yang tidak jelas.
3	Sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup kebijakan, kriteria, tanpa prosedur dan instrumen sistem pengambilan keputusan.
2	Sistem penerimaan mahasiswa baru yang bergantung pada kebijakan pimpinan.
1	Keputusan penerimaan mahasiswa baru tanpa prosedur yang jelas.
12.4 Kelengkapan sistem penerimaan mahasiswa baru yang memberikan peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus.	
7	Lebih dari 20% mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus dan lulus seleksi dapat mengikuti program tanpa membayar finansial dan semua mendapat beasiswa.
6	Semua mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus dan lulus seleksi dapat mengikuti program dengan pengaturan finansial yang sudah diatur sistem subsidi dan beasiswa.
5	Semua mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus dan lulus seleksi dapat mengikuti program dengan pertimbangan finansial yang diatur sistem subsidi dan pinjaman.
4	Semua mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus dan lulus seleksi dapat mengikuti program dengan pertimbangan finansial karena sudah diatur sistem subsidi.

3	Semua mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus dan lulus seleksi dapat mengikuti program dengan pertimbangan finansial yang memungkinkan dibayar jangka panjang.
2	Semua mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus dan lulus seleksi dapat mengikuti program dengan pertimbangan finansial yang memungkinkan dibayar jangka pendek.
1	Hanya mahasiswa baru dengan kemampuan finansial tertentu dapat diterima.
12.5 Rasio jumlah mahasiswa yang diterima terhadap jumlah mahasiswa yang ikut seleksi.	
7	Kurang 10 % pendaftar diterima sebagai mahasiswa baru.
6	10-20 % pendaftar diterima sebagai mahasiswa baru.
5	20-<40 % pendaftar diterima sebagai mahasiswa baru.
4	40-<60% pendaftar diterima sebagai mahasiswa baru.
3	60-<80 % pendaftar diterima sebagai mahasiswa baru.
2	80-<100 % pendaftar diterima sebagai mahasiswa baru.
1	100 pendaftar diterima sebagai mahasiswa baru.
12.6 Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi.	
7	Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi >95%.
6	Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi 80-95%.
5	Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi 70-<80%.
4	Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi 60-<70%.
3	Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi 50-<60%.
2	Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi 40-<50%.
1	Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi <40%.
12.7 Rasio jumlah mahasiswa baru transfer terhadap jumlah mahasiswa baru bukan transfer.	
7	Kurang 10% mahasiswa merupakan mahasiswa transfer dari perguruan tinggi lain.
6	10-20 % mahasiswa merupakan merupakan mahasiswa transfer dari perguruan tinggi lain.
5	20-<40 % mahasiswa merupakan merupakan mahasiswa transfer dari perguruan tinggi lain.
4	40-<60 % mahasiswa merupakan merupakan mahasiswa transfer dari perguruan tinggi lain
3	60-<80% mahasiswa merupakan merupakan mahasiswa transfer dari perguruan tinggi lain.
2	80-<100% mahasiswa merupakan merupakan mahasiswa transfer dari perguruan tinggi lain.
1	100% mahasiswa merupakan merupakan mahasiswa transfer dari perguruan tinggi lain.
13 Kualitas Layanan kepada Mahasiswa	

13.1 Kejelasan instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan.	
7	Instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang sah, andal, dan mudah diterapkan untuk (1) proses perkuliahan; (2) perpustakaan; (3) olah raga/beladiri; (4) seni; (5) kesehatan; (6) lainnya, yang dilaksanakan secara berkala setiap semester untuk butir (1) dan tahunan untuk (2) – (6).
6	Instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang sah, andal, dan mudah diterapkan untuk (1) dilaksanakan secara berkala setiap semester dan tahunan untuk 4 hal di antara (2) – (6).
5	Instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang sah, andal, dan mudah diterapkan untuk (1) dilaksanakan secara berkala setiap semester dan tahunan untuk 3 hal diantara (2) – (6).
4	Instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang sah, andal dan diterapkan untuk (1) dilaksanakan secara berkala setiap semester dan untuk 3 hal diantara (2) – (6) dilakukan setiap 2-3 tahunan.
3	Instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang sah, andal dan diterapkan untuk (1) dilaksanakan secara berkala setiap semester dan 2 hal diantara (2) – (6) dilakukan setiap 2-3 tahunan.
2	Instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang sah, andal dan diterapkan untuk (1) dilaksanakan dan 2 hal diantara (2) – (6) dilakukan secara tidak berkala/teratur.
1	Belum memiliki instrumen untuk mengukur kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan.
13.2 Hasil pelaksanaan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan, dan tindak lanjutnya.	
7	Laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang komprehensif, dianalisis dengan metode yang tepat, disimpulkan dengan baik, digunakan untuk perbaikan sistem manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
6	Laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang komprehensif, dianalisis dengan metode yang tepat, disimpulkan dengan baik, digunakan untuk perbaikan sistem manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan, namun tidak mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
5	Laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang kurang komprehensif, dianalisis dengan metode yang tepat, disimpulkan dengan baik, digunakan untuk perbaikan sistem manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
4	Laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang kurang komprehensif, dianalisis dengan metode yang tepat, disimpulkan dengan baik, digunakan untuk perbaikan sistem manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan, tetapi tidak mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
3	Laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang komprehensif, tetapi tidak dianalisis dengan metode yang tepat, dan digunakan untuk perbaikan sistem manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan, dan tidak mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
2	Laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan dan digunakan untuk perbaikan sistem manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan tetapi tidak dapat diakses oleh pemangku kepentingan.
1	Belum ditemukan laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan

	kegiatan kemahasiswaan.
13.3 Ketersediaan layanan kepada mahasiswa dalam bidang bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pembinaan soft skills, beasiswa, dan kesehatan.	
7	Ketersediaan layanan kepada mahasiswa dalam aspek (1) bimbingan dan konseling, (2) minat dan bakat, (3) pembinaan soft skills, (4) beasiswa dan (5) kesehatan.
6	Ketersediaan layanan kepada mahasiswa dalam 4 dari 5 aspek (1) bimbingan dan konseling, (2) minat dan bakat, (3) pembinaan soft skills, (4) beasiswa dan (5) kesehatan.
5	Ketersediaan layanan kepada mahasiswa dalam 3 dari 5 aspek (1) bimbingan dan konseling, (2) minat dan bakat, (3) pembinaan soft skills, (4) beasiswa dan (5) kesehatan.
4	Ketersediaan layanan kepada mahasiswa dalam 2 dari 5 aspek (1) bimbingan dan konseling, (2) minat dan bakat, (3) pembinaan soft skills, (4) beasiswa dan (5) kesehatan.
3	Ketersediaan layanan kepada mahasiswa dalam 1 dari 5 aspek (1) bimbingan dan konseling, (2) minat dan bakat, (3) pembinaan soft skills, (4) beasiswa dan (5) kesehatan.
2	Ketersediaan layanan kepada mahasiswa dalam 1 dari 5 aspek (1) bimbingan dan konseling, (2) minat dan bakat, (3) pembinaan soft skills, (4) beasiswa dan (5) kesehatan namun kurang representatif.
1	Tidak ada layanan kepada mahasiswa.
13.4 Ketersediaan program layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa.	
7	PT memiliki dokumen kebijakan dan program terjadual tentang pemberian layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup: (1) penyebaran informasi kerja, (2) penyelenggaraan bursa kerja, (3) perencanaan karier, (4) pelatihan melamar kerja, dan (5) layanan penempatan kerja.
6	PT memiliki dokumen kebijakan dan program terjadual tentang pemberian layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup 4 dari 5 aspek: (1) penyebaran informasi kerja, (2) penyelenggaraan bursa kerja, (3) perencanaan karier, (4) pelatihan melamar kerja, dan (5) layanan penempatan kerja.
5	PT memiliki dokumen kebijakan dan program terjadual tentang pemberian layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup 3 dari 5 aspek: (1) penyebaran informasi kerja, (2) penyelenggaraan bursa kerja, (3) perencanaan karier, (4) pelatihan melamar kerja, dan (5) layanan penempatan kerja.
4	PT memiliki dokumen kebijakan dan program terjadual tentang pemberian layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup 2 dari 5 aspek: (1) penyebaran informasi kerja, (2) penyelenggaraan bursa kerja, (3) perencanaan karier, (4) pelatihan melamar kerja, dan (5) layanan penempatan kerja.
3	PT memiliki dokumen kebijakan dan program terjadual tentang pemberian layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup 1 dari 5 aspek: (1) penyebaran informasi kerja, (2) penyelenggaraan bursa kerja, (3) perencanaan karier, (4) pelatihan melamar kerja, dan (5) layanan penempatan kerja.
2	PT sedang mengembangkan dokumen formal kebijakan dan pelaksanaan layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan
1	PT belum memiliki dokumen formal kebijakan dan pelaksanaan layanan bimbingan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan.

14. Sistem Penjaminan Mutu	
14.1 Keberadaan sistem mutu internal yang lengkap dengan kriteria dan instrumen penilaian serta pemakaiannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja, serta diseminasi hasilnya.	
7	PT memiliki Komitmen pengembangan Mutu yang lengkap meliputi: (1) Pernyataan Mutu, (2) Kebijakan Mutu, (3) Unit Pelaksana, (4) Standar Mutu, (5) Prosedur Mutu, (6) Instruksi Kerja, (7) Pentahapan Sasaran Mutu, yang terintegrasi dalam suatu sistem dokumen, dan ada bukti dokumen pelaksanaannya.
6	PT memiliki Komitmen pengembangan Mutu yang lengkap meliputi: (1) Pernyataan Mutu, (2) Kebijakan Mutu, (3) Unit Pelaksana, (4) Standar Mutu, (5) Prosedur Mutu, (6) Instruksi Kerja, (7) Pentahapan Sasaran Mutu, tidak terintegrasi dalam suatu sistem dokumen, tetapi ada bukti dokumen pelaksanaannya.
5	PT memiliki Komitmen pengembangan Mutu yang lengkap, meliputi: (1) Pernyataan Mutu, (2) Kebijakan Mutu, (3) Unit Pelaksana, (4) Standar Mutu, (5) Prosedur Mutu, (6) Instruksi Kerja, (7) Pentahapan Sasaran Mutu yang terintegrasi dalam suatu sistem dokumen, tetapi tidak ada bukti-bukti dokumen pelaksanaannya.
4	PT memiliki Komitmen pengembangan Mutu yang lengkap, meliputi: (1) Pernyataan Mutu, (2) Kebijakan Mutu, (3) Unit Pelaksana, (4) Standar Mutu, (5) Prosedur Mutu, (6) Instruksi Kerja, (7) Pentahapan Sasaran Mutu, tetapi tidak terintegrasi dalam suatu sistem dokumen dan tidak ada bukti dokumen pelaksanaannya.
3	PT memiliki hanya 5 dari 7 Komitmen pengembangan Mutu sebagai berikut: (1) Pernyataan Mutu, (2) Kebijakan Mutu, (3) Unit Pelaksana, (4) Standar Mutu, (5) Prosedur Mutu, (6) Instruksi Kerja, (7) Pentahapan Sasaran Mutu.
2	PT memiliki hanya 3 dari 7 Komitmen pengembangan Mutu sebagai berikut: (1) Pernyataan Mutu, (2) Kebijakan Mutu, (3) Unit Pelaksana, (4) Standar Mutu, (5) Prosedur Mutu, (6) Instruksi Kerja, (7) Pentahapan Sasaran Mutu.
1	PT memiliki kurang dari 3 Komitmen pengembangan Mutu sebagai berikut: (1) Pernyataan Mutu, (2) Kebijakan Mutu, (3) Unit Pelaksana, (4) Standar Mutu, (5) Prosedur Mutu, (6) Instruksi Kerja, (7) Pentahapan Sasaran Mutu.
14.2 Penerapan sistem penjaminan mutu dan pelaksanaannya.	
7	Tercapainya sasaran penjaminan mutu sesuai SNP ditambah stándar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik, serta dikembangkan secara berkelanjutan.
6	Pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu sesuai SNP ditambah stándar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik, tetapi belum dikembangkan.
5	Pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu minimal di bidang (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) sarana prasarana, yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik, serta ditindak lanjuti dan sudah dikembangkan.
4	Pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu minimal di bidang (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik, serta ditindaklanjuti tetapi belum dikembangkan.
3	Pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu minimal di bidang (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat terdokumentasi tetapi tidak disosialisasikan dengan baik.
2	Pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu di bidang (1) pendidikan, tetapi tidak ada di bidang penelitian atau pengabdian kepada masyarakat.
1	Belum tersedianya hasil monitoring sasaran penjaminan mutu.

14.3 Keberadaan sistem audit mutu internal yang lengkap dengan kriteria dan instrumen penilaian serta pemakaiannya untuk mengukur kinerja PT.	
7	Perguruan tinggi memiliki kriteria dan instrumen penilaian, menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit, dan hasil pengukurannya digunakan serta didiseminasikan kepada semua <i>stakeholders</i> .
6	Perguruan tinggi memiliki kriteria dan instrumen penilaian, menggunakannya untuk mengukur kinerja tiap unit, dan hasilnya digunakan didiseminasikan terbatas secara internal.
5	Perguruan tinggi memiliki kriteria dan instrumen penilaian, menggunakannya untuk mengukur kinerja tiap unit, dan hasilnya digunakan tetapi tidak didiseminasikan.
4	Perguruan tinggi memiliki kriteria dan instrumen penilaian, menggunakannya untuk mengukur kinerja tiap unit tetapi hasilnya tidak digunakan serta tidak didiseminasikan.
3	Perguruan tinggi memiliki kriteria dan instrumen penilaian, tetapi belum digunakan untuk mengukur kinerja tiap unit.
2	Perguruan tinggi memiliki kriteria kinerja setiap unit kerja tetapi tidak memiliki instrument penilaian untuk mengukur kinerja unit kerjanya.
1	Perguruan tinggi tidak memiliki kriteria dan instrumen penilaian untuk mengukur kinerja unit kerjanya.
14.4 Sistem monitoring dan evaluasi implementasi penjaminan mutu serta tindak lanjutnya.	
7	Ada sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu di bidang (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) sarana prasarana, (5) keuangan, (6) manajemen yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik serta ditindaklanjuti.
6	Ada sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu di bidang (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) sarana prasarana (5) keuangan, (6) manajemen, yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik tetapi tidak ditindaklanjuti secara komprehensif.
5	Ada sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu tercapai 5 dari 6 di bidang (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) sarana prasarana, (5) keuangan, (6) manajemen yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik serta ditindaklanjuti.
4	Ada sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu tercapai 4 dari 6 di bidang (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) sarana prasarana, (5) keuangan, (6) manajemen yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik serta ditindaklanjuti.
3	Ada sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu tercapai 3 dari 6 di bidang (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) sarana prasarana, (5) keuangan, (6) manajemen yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik serta ditindaklanjuti.
2	Ada sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu tercapai 2 dari 6 di bidang (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) sarana prasarana, (5) keuangan, (6) manajemen yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik serta ditindaklanjuti.
1	Ada sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu tercapai 1 dari 6 di bidang (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) sarana prasarana, (5) keuangan, (6) manajemen yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik serta ditindaklanjuti.

G. STANDAR PEMBIAYAAN

15. Pengelolaan Dana	
15.1 Kejelasan dan kelengkapan dokumen kebijakan pengelolaan dana.	
7	Ada dokumen: (1) kebijakan pengelolaan dana, (2) standar prosedur operasional pengelolaan keuangan, dan (3) lelang pekerjaan barang atau jasa yang jelas dan lengkap, dan telah dilaksanakan, dievaluasi, dan dikembangkan secara konsisten di seluruh unit kerja.
6	Ada dokumen: (1) kebijakan pengelolaan dana, (2) standar prosedur operasional pengelolaan keuangan, dan (3) lelang pekerjaan barang atau jasa yang jelas dan lengkap, dan telah dilaksanakan, dievaluasi, dan dikembangkan secara konsisten di sebagian unit kerja.
5	Ada dokumen: (1) kebijakan pengelolaan dana, (2) standar prosedur operasional pengelolaan keuangan, dan (3) lelang pekerjaan barang atau jasa yang jelas dan lengkap, belum dilaksanakan secara konsisten.
4	Ada dokumen: (1) kebijakan pengelolaan dana, (2) standar prosedur operasional pengelolaan keuangan, dan (3) lelang pekerjaan barang atau jasa belum jelas dan lengkap, serta belum dilaksanakan.
3	Ada dokumen kebijakan pengelolaan dana, tetapi belum ada standar prosedur operasional pengelolaan keuangan.
2	Sedang dikembangkan dokumen kebijakan pengelolaan dana, ada standar prosedur operasional pengelolaan keuangan, dan ada dokumen lelang pekerjaan barang atau jasa.
1	Tidak ada dokumen kebijakan pengelolaan dana.
15.2 Persentase sumber biaya yang diperoleh dari hibah, <i>business unit</i> (unit bisnis/ usaha/ventura), hasil kerjasama akademik, alumni, masyarakat dan sebagainya per tahun.	
7	Persentase sumber biaya yang diperoleh dari hibah, <i>business unit</i> , hasil kerjasama akademik, alumni, masyarakat dan sebagainya >20% dari total pembiayaan pendidikan.
6	Persentase sumber biaya yang diperoleh dari hibah, <i>business unit</i> , hasil kerjasama akademik, alumni, masyarakat dan sebagainya 15-20% dari total pembiayaan pendidikan.
5	Persentase sumber biaya yang diperoleh dari hibah, <i>business unit</i> , hasil kerjasama akademik, alumni, masyarakat dan sebagainya 10-<15% dari total pembiayaan pendidikan.
4	Persentase sumber biaya yang diperoleh dari hibah, <i>business unit</i> , hasil kerjasama akademik, alumni, masyarakat dan sebagainya 5-<10% dari total pembiayaan pendidikan.
3	Persentase sumber biaya yang diperoleh dari hibah, <i>business unit</i> , hasil kerjasama akademik, alumni, masyarakat dan sebagainya 3%-<5% dari total pembiayaan pendidikan.
2	Persentase sumber biaya yang diperoleh dari hibah, <i>business unit</i> , hasil kerjasama akademik, alumni, masyarakat dan sebagainya <3% dari total pembiayaan pendidikan
1	Tidak ada sumber biaya yang diperoleh dari hibah, <i>business unit</i> , hasil kerjasama akademik, alumni, masyarakat dan sebagainya.
15.3 Kejelasan pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan peraturan yang berlaku.	
7	Ada pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai peraturan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan unsur pimpinan, dosen, dan

	pemangku kepentingan lainnya.
6	Ada pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai peraturan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan unsur pimpinan dan dosen.
5	Ada pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai peraturan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan unsur pimpinan.
4	Ada pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana yang melibatkan unsur pimpinan dan dosen dilakukan secara transparan tetapi tidak akuntabel.
3	Ada pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana yang melibatkan unsur pimpinan secara transparan tetapi tidak akuntabel.
2	Ada pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana yang melibatkan unsur pimpinan tetapi dilakukan secara tidak transparans dan tidak akuntabel.
1	Tidak ada pedoman.
15.4 Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa.	
7	Ada pedoman mekanisme yang jelas dalam penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan semua unsur pimpinan, dosen, dan pemangku kepentingan lainnya.
6	Ada pedoman mekanisme yang jelas dalam penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan semua unsur pimpinan dan dosen.
5	Ada pedoman mekanisme yang jelas dalam penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan semua unsur pimpinan.
4	Ada pedoman mekanisme yang jelas dalam penetapan biaya pendidikan mahasiswa tetapi tidak melibatkan semua unsur pimpinan.
3	Ada pedoman mekanisme yang tidak jelas dalam penetapan biaya pendidikan mahasiswa walaupun sudah melibatkan unsur pimpinan.
2	Ada pedoman mekanisme yang tidak jelas dalam penetapan biaya pendidikan mahasiswa dan tidak melibatkan unsur mana pun.
1	Tidak ada pedoman.
15.5 Persentase dana PT yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan pembiayaan pendidikan.	
7	Persentase dana PT yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan pembiayaan pendidikan <50%.
6	Persentase dana PT yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan pembiayaan pendidikan 50-60%.
5	Persentase dana PT yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan pembiayaan pendidikan 61-70%.
4	Persentase dana PT yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan pembiayaan pendidikan 71-80%.
3	Persentase dana PT yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan pembiayaan pendidikan 81-90%.
2	Persentase dana PT yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan pembiayaan pendidikan 91-99%.
1	Persentase dana PT yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan pembiayaan pendidikan 100%.
15.6 Kejelasan kebijakan dan mekanisme pembiayaan mahasiswa.	
7	Ada pedoman mekanisme dan kejelasan kebijakan pembiayaan mahasiswa, ada mekanisme rapat yang transparan, melibatkan semua unsur pimpinan, dosen, dan pemangku kepentingan lainnya.
6	Ada pedoman mekanisme yang lengkap dan kejelasan kebijakan pembiayaan

	mahasiswa, ada mekanisme rapat yang transparan, melibatkan semua unsur pimpinan dan dosen.
5	Ada pedoman mekanisme yang lengkap dan kejelasan kebijakan pembiayaan mahasiswa, ada mekanisme rapat yang transparan, melibatkan semua unsur pimpinan.
4	Ada pedoman mekanisme yang lengkap dan kejelasan kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa, ada mekanisme rapat yang transparan tetapi tidak melibatkan semua unsur pimpinan.
3	Ada pedoman mekanisme dan kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa, namun tidak lengkap walaupun sudah melibatkan unsur pimpinan.
2	Ada pedoman mekanisme dan kejelasan kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa tetapi tidak jelas.
1	Tidak ada kebijakan dan mekanisme pembiayaan mahasiswa.
15.7 Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat.	
7	Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat sebesar 75%-90% dari total anggaran dana dengan pertanggung jawaban keuangan yang transparan dan akuntabel.
6	Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat sebesar 67,5% < 75% dari total anggaran dana dengan pertanggung jawaban keuangan yang transparan dan akuntabel.
5	Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat sebesar 50% < 67,5% dari total anggaran dana dengan pertanggung jawaban keuangan yang transparan dan akuntabel.
4	Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat sebesar 35% < 50% dari total anggaran dana dengan pertanggung jawaban keuangan yang transparan dan akuntabel.
3	Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat sebesar 22,5% < 35% dari total anggaran dana dengan pertanggung jawaban keuangan yang transparan dan akuntabel.
2	Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat sebesar 10% < 22,5% dari total anggaran dana dengan pertanggung jawaban keuangan yang transparan dan akuntabel.
1	Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat sebesar < 10% dari total anggaran dana dengan pertanggung jawaban keuangan yang transparan dan akuntabel.
15.8 Kejelasan sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal.	
7	Ada (1) standar prosedur operasional sistem monitoring pendanaan internal, (2) standar prosedur operasional evaluasi pendanaan internal, (3) bukti pelaksanaan monitoring dan (4) bukti pelaksanaan evaluasi keuangan internal yang lengkap.
6	Ada (1) standar prosedur operasional sistem monitoring pendanaan internal, (2) standar prosedur operasional evaluasi pendanaan internal, dan (3) bukti pelaksanaan monitoring.
5	Ada (1) standar prosedur operasional sistem monitoring pendanaan internal, dan (2) standar prosedur operasional evaluasi pendanaan internal dengan (3) bukti pelaksanaan tidak lengkap.
4	Ada (1) standar prosedur operasional sistem monitoring pendanaan internal dengan (2) bukti pelaksanaan yang baik tetapi tanpa ada evaluasi pendanaan internal.
3	Ada (1) standar prosedur operasional evaluasi pendanaan internal dengan (2) bukti pelaksanaan yang baik tetapi tanpa ada monitoring pendanaan internal.

2	Ada standar prosedur operasional sistem monitoring pendanaan internal, atau ada standar prosedur operasional evaluasi pendanaan internal tetapi bukti pelaksanaan tidak lengkap.
1	Tidak ada sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal.
15.9 Laporan keuangan yang transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	
7	Ada laporan keuangan yang transparan, ada audit internal, ada audit eksternal (akuntan publik) dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
6	Ada laporan keuangan yang transparan, ada audit internal, dan ada evaluasi audit eksternal (akuntan publik) tetapi hanya dapat diakses oleh sebagian pemangku kepentingan.
5	Ada laporan keuangan yang transparan tetapi hanya dilakukan audit internal.
4	Ada laporan keuangan yang transparan tanpa audit internal dan eksternal.
3	Hanya ada evaluasi audit internal.
2	Laporan keuangan tidak transparan.
1	Tidak ada laporan keuangan.

H. STANDAR PENILAIAN

16. Evaluasi Hasil Belajar	
16.1 Kesesuaian sistem evaluasi hasil belajar dengan ranah kompetensi lulusan yang ditetapkan.	
7	Sistem evaluasi hasil belajar yang diterapkan sesuai dengan ranah kompetensi lulusan, selalu ditinjau secara berkala, dan telah diverifikasi oleh <i>stakeholder</i> .
6	Sistem evaluasi hasil belajar yang diterapkan sesuai dengan ranah kompetensi lulusan, ditinjau secara insidental, dan telah diverifikasi oleh <i>stakeholder</i> .
5	Sistem evaluasi hasil belajar yang diterapkan sesuai dengan ranah kompetensi lulusan dan ditinjau serta telah diverifikasi oleh <i>stakeholder</i> .
4	Sistem evaluasi hasil belajar yang diterapkan sesuai dengan ranah kompetensi lulusan dan selalu ditinjau secara berkala.
3	Sistem evaluasi hasil belajar yang diterapkan sesuai dengan ranah kompetensi lulusan dan ditinjau secara insidental.
2	Sistem evaluasi hasil belajar yang diterapkan sesuai dengan ranah kompetensi lulusan tetapi tidak pernah ditinjau.
1	Sistem evaluasi hasil belajar yang telah diterapkan belum sesuai dengan ranah kompetensi lulusan.
16.2 Kesesuaian sistem evaluasi hasil belajar dengan model pengukuran yang tepat.	
7	PT telah menerapkan sistem evaluasi hasil belajar dengan model pengukuran yang tepat dan selalu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan secara periodik setiap empat tahun dan dilaksanakan dengan melibatkan <i>stakeholder</i> .
6	PT telah menerapkan sistem evaluasi hasil belajar dengan model pengukuran yang tepat dan selalu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan secara periodik setiap empat tahun dan dilaksanakan tetapi belum melibatkan <i>stakeholder</i> .
5	PT telah menerapkan sistem evaluasi hasil belajar dengan model pengukuran yang tepat dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan secara periodik setiap delapan tahun dengan melibatkan dan <i>stakeholder</i> .
4	PT telah menerapkan sistem evaluasi hasil belajar dengan model pengukuran yang tepat dan selalu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan secara periodik setiap

	delapan tahun dan tidak melibatkan <i>stakeholder</i> .
3	PT telah menerapkan sistem evaluasi hasil belajar dengan model pengukuran yang tepat dan selalu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan secara periodik setiap dua belas tahun dan dilaksanakan tidak melibatkan <i>stakeholder</i> .
2	PT telah menerapkan sistem evaluasi hasil belajar dengan model pengukuran yang tepat tetapi tidak pernah disesuaikan dengan perkembangan.
1	PT tidak menerapkan Sistem evaluasi hasil belajar dengan model pengukuran yang tepat.
16.3 Kesesuaian butir-butir soal dengan <i>luaran pembelajaran</i> yang ditetapkan dalam pembelajaran dan silabus.	
7	Butir-butir soal dikembangkan melalui pengembangan kisi-kisi sesuai dengan <i>luaran pembelajaran (learning outcome)</i> sesuai dengan silabus dan selalu ditinjau secara periodik setiap tahun.
6	Butir-butir soal dikembangkan melalui pengembangan kisi-kisi sesuai dengan <i>luaran pembelajaran</i> sesuai dengan silabus dan selalu ditinjau secara periodik tiap tiga tahun.
5	Butir-butir soal dikembangkan melalui pengembangan kisi-kisi sesuai dengan <i>luaran pembelajaran</i> sesuai dengan silabus dan selalu ditinjau secara periodik tiap lima tahun.
4	Butir-butir soal dikembangkan melalui pengembangan kisi-kisi sesuai dengan <i>luaran pembelajaran</i> sesuai dengan silabus dan selalu ditinjau secara periodik tiap sepuluh tahun.
3	Butir-butir soal dikembangkan melalui pengembangan kisi-kisi sesuai dengan <i>luaran pembelajaran</i> tetapi belum didasarkan atas isi silabus dan selalu ditinjau secara periodik tiap tiga tahun.
2	Butir-butir soal dikembangkan melalui pengembangan kisi-kisi belum sesuai dengan <i>luaran pembelajaran</i> dan selalu ditinjau secara periodik tiap tiga tahun.
1	Butir-butir soal belum dikembangkan melalui pengembangan kisi-kisi dan belum disesuaikan dengan <i>luaran pembelajaran</i> .
16.4 Intensitas <i>review</i> soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun UAS (Ujian Akhir Semester) oleh komisi ujian/ pejabat yang bertanggung jawab.	
7	Intensitas <i>review</i> soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun UAS (Ujian Akhir Semester) dilakukan oleh komisi ujian dengan validasi dari <i>peer reviewer</i> secara berkala setiap tahun.
6	Intensitas <i>review</i> soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun UAS (Ujian Akhir Semester) dilakukan oleh komisi ujian dengan validasi dari <i>peer reviewer</i> secara berkala setiap semester.
5	Intensitas <i>review</i> soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun UAS (Ujian Akhir Semester) dilakukan oleh komisi ujian dengan validasi dari <i>peer reviewer</i> secara berkala setiap dua tahun.
4	Intensitas <i>review</i> soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun UAS (Ujian Akhir Semester) dilakukan oleh komisi ujian secara periodik setiap semester dan tidak melibatkan <i>peer reviewer</i> .
3	Intensitas <i>review</i> soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun UAS (Ujian Akhir Semester) dilakukan oleh komisi ujian secara periodik setiap semtahun dan tidak melibatkan <i>peer reviewer</i> .
2	Intensitas <i>review</i> soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun UAS (Ujian Akhir Semester) dilakukan oleh komisi ujian secara periodik setiap dua tahun tetapi dan tidak melibatkan <i>peer reviewer</i> .
1	Tidak ada <i>review</i> soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun UAS (Ujian Akhir Semester).

16.5 Tingkat kejelasan mekanisme dan pedoman ujian TA (Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi).	
7	PT memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman ujian TA (Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi) yang direview oleh tim secara berkala setiap tiga tahun.
6	PT memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman ujian TA (Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi) yang direview oleh tim secara berkala setiap lima tahun.
5	PT memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman ujian TA (Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi) yang direview oleh tim secara berkala setiap tujuh tahun.
4	PT memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman ujian TA (Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi) yang tidak pernah direview oleh tim.
3	PT memiliki pedoman yang tidak jelas tentang mekanisme dan pedoman ujian TA (Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi) yang tidak pernah direview oleh tim.
2	(Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi) yang tidak pernah direview oleh tim. 2 PT memiliki pedoman yang tidak jelas tentang mekanisme dan pedoman ujian TA (Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi) dan tidak pernah direview oleh tim.
1	PT tidak memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman ujian TA (Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi).
16.6 Ketersediaan mekanisme/pedoman perbaikan nilai.	
7	PT memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman perbaikan nilai dan <i>review</i> oleh tim secara berkala setiap empat tahun.
6	PT memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman perbaikan nilai dan <i>review</i> oleh tim secara berkala setiap delapan tahun.
5	PT memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman perbaikan nilai dan <i>review</i> oleh tim secara berkala setiap dua belas tahun.
4	PT memiliki pedoman yang kurang jelas tentang mekanisme dan pedoman perbaikan nilai dan <i>review</i> oleh tim secara berkala setiap empat tahun.
3	PT memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman perbaikan nilai dan <i>review</i> oleh tim secara berkala setiap delapan tahun.
2	PT memiliki pedoman yang tidak jelas tentang mekanisme dan pedoman perbaikan nilai dan <i>review</i> oleh tim secara berkala setiap empat tahun.
1	PT tidak memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman perbaikan nilai.

I. STANDAR PENELITIAN

17. Capaian Penelitian	
17.1 Kejelasan dan kelengkapan pedoman pengelolaan penelitian.	
7	Ada pedoman yang jelas dan lengkap tentang kebijakan dasar implementasi, monitoring, dan evaluasi penelitian, penanganan plagiasi dan paten (HKI), perencanaan dan pelaksanaan penelitian, dokumentasi proposal penelitian dan hasil penelitian yang mudah diakses oleh semua pihak (4 aspek).
6	Ada pedoman yang jelas dan namun belum lengkap tentang kebijakan dasar implementasi penelitian, penanganan plagiasi dan paten (HKI), perencanaan dan pelaksanaan penelitian, dokumentasi proposal penelitian dan hasil penelitian yang mudah diakses oleh semua pihak (4 aspek).
5	Ada pedoman yang jelas dan lengkap tentang kebijakan dasar pengelolaan penelitian, penanganan plagiasi dan paten (HKI), perencanaan dan pelaksanaan penelitian, dokumentasi proposal penelitian dan hasil penelitian yang mudah diakses oleh semua pihak (3 aspek).

4	Ada pedoman yang jelas dan lengkap tentang kebijakan dasar pengelolaan penelitian, penanganan plagiasi dan paten (HKI), perencanaan dan pelaksanaan penelitian, dokumentasi proposal penelitian dan hasil penelitian yang mudah diakses oleh semua pihak (2 aspek).
3	Ada pedoman yang jelas dan lengkap tentang kebijakan dasar pengelolaan penelitian, penanganan plagiasi dan paten (HKI), perencanaan dan pelaksanaan penelitian, dokumentasi proposal penelitian dan hasil penelitian yang mudah diakses oleh semua pihak (1 aspek).
2	Sedang dikembangkan pedoman pelaksanaan penelitian serta dokumentasi proposal penelitian dan hasil penelitian yang mudah diakses oleh semua pihak.
1	Belum ada pedoman pelaksanaan penelitian serta dokumentasi proposal penelitian dan hasil penelitian yang mudah diakses oleh semua pihak.
17.2 Persentase dosen yang menjalankan penelitian pada tingkat internasional, nasional dan internal tiga tahun terakhir.	
7	Persentase dosen yang menjalankan penelitian pada tingkat internasional sebanyak >40%.
6	Persentase dosen yang menjalankan penelitian pada tingkat internasional 20- 40%.
5	Persentase dosen yang menjalankan penelitian pada tingkat internasional 10-<20%.
4	Persentase dosen yang menjalankan penelitian pada tingkat internasional <10%, nasional >40%.
3	Ada dosen yang menjalankan penelitian tingkat nasional, dengan persentase <40%.
2	Sudah ada dosen yang menjalankan penelitian internal.
1	Belum ada dosen yang menjalankan penelitian.
17.3 Besaran dan proporsi dana penelitian/<i>funding</i> yang diperoleh dari institusi internasional, nasional dan lokal tiga tahun terakhir.	
7	Besaran dan proporsi dana penelitian/ <i>funding</i> yang diperoleh dari dana institusi internasional sebanyak >25% dari total dana penelitian.
6	Besaran dan proporsi dana penelitian/ <i>funding</i> yang diperoleh dari dana institusi internasional 10- 25% dari total dana penelitian.
5	Besaran dan proporsi dana penelitian/ <i>funding</i> yang diperoleh dari dana institusi nasional sebanyak > 25% dari total dana penelitian.
4	Besaran dan proporsi dana penelitian/ <i>funding</i> yang diperoleh dari dana institusi nasional 10- 25% dari total dana penelitian.
3	Besaran dan proporsi dana penelitian/ <i>funding</i> yang diperoleh dari dana internal sebanyak \geq 25% dari total dana penelitian.
2	Besaran dan proporsi dana penelitian/ <i>funding</i> yang diperoleh dari dana internal di bawah <25% dari total dana penelitian.
1	Belum ada besaran dan proporsi dana penelitian atau <i>funding</i> yang diperoleh.
17.4 Persentase publikasi artikel ilmiah dan jumlah artikel yang tersitasi tiga tahun terakhir.	
7	Persentase publikasi artikel ilmiah pada jurnal internasional >25%.
6	Persentase publikasi artikel ilmiah pada jurnal internasional 15-25%.
5	Persentase publikasi artikel ilmiah pada jurnal internasional 5-<15%.
4	Persentase publikasi artikel ilmiah antara 30-50% dengan sebaran utama dalam jurnal nasional.
3	Persentase publikasi artikel ilmiah di atas 10-<30% dengan sebaran utama dalam jurnal nasional.
2	Persentase publikasi artikel ilmiah <10% dengan sebaran utama dalam jurnal nasional.
1	Belum ada publikasi artikel ilmiah dalam jurnal nasional.

17.5 Persentase publikasi buku tiga tahun terakhir.	
7	Persentase publikasi buku >25% diterbitkan oleh penerbit internasional.
6	Persentase publikasi buku 15-25% diterbitkan oleh penerbit internasional.
5	Persentase publikasi buku 5-<15% diterbitkan oleh penerbit internasional.
4	Persentase publikasi buku >25% diterbitkan oleh penerbit nasional.
3	Persentase publikasi buku 10-25% diterbitkan oleh penerbit nasional.
2	Persentase publikasi buku <10% diterbitkan oleh penerbit nasional.
1	Belum ada buku yang diterbitkan oleh penerbit nasional.
17.6 Jumlah paten.	
7	Jumlah paten yang telah dikabulkan/ <i>granted</i> > 50, dan ada yang telah dikomersialisasikan.
6	Jumlah paten yang telah dikabulkan/ <i>granted</i> 25-50.
5	Jumlah paten yang telah dikabulkan/ <i>granted</i> 15-<25.
4	Jumlah paten yang telah dikabulkan/ <i>granted</i> 10-<15.
3	Jumlah paten yang telah dikabulkan/ <i>granted</i> <10.
2	Jumlah paten yang telah didaftarkan kurang dari 50, belum ada yang dikabulkan/ <i>granted</i> .
1	Belum ada paten yang didaftarkan untuk diajukan paten.
17.7 Jumlah prototipe/ karya seni/ model dan modul pembelajaran/ teknologi tepat guna yang diterapkan.	
7	Rasio prototipe/ karya seni/ model dan modul pembelajaran/ teknologi tepat guna yang diterapkan di tingkat internasional sebanyak > 25%.
6	Rasio prototipe/ karya seni/ model dan modul pembelajaran/ teknologi tepat guna yang diterapkan di tingkat internasional 15-25%.
5	Rasio prototipe/ karya seni/ model dan modul pembelajaran/ teknologi tepat guna yang diterapkan di tingkat internasional 5-<15%.
4	Rasio prototipe/ karya seni/ model dan modul pembelajaran/ teknologi tepat guna yang diterapkan di tingkat nasional >25%.
3	Rasio prototipe/ karya seni/ model dan modul pembelajaran/ teknologi tepat guna yang diterapkan di tingkat nasional 10-25%.
2	Rasio prototipe/ karya seni/ model dan modul pembelajaran/ teknologi tepat guna yang diterapkan di tingkat nasional <10%.
1	Belum ada prototipe/ karya seni/ model dan modul pembelajaran/ teknologi tepat guna yang diterapkan.
17.8 Persentase dosen yang berperan sebagai <i>invited speaker</i> tiga tahun terakhir.	
7	Persentase dosen yang berperan sebagai <i>invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah internasional >10%.
6	Persentase dosen yang berperan sebagai <i>invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah internasional 5-10%.
5	Persentase dosen yang berperan sebagai <i>invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah internasional <5%.
4	Persentase dosen yang berperan sebagai <i>invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah nasional >10%.
3	Persentase dosen yang berperan sebagai <i>invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah nasional 5-10%.
2	Persentase dosen yang berperan sebagai <i>invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah nasional <5%.
1	Belum ada dosen yang menjadi <i>invited speaker</i> di tingkat internasional maupun nasional.

17.9 Persentase dosen yang berperan sebagai penyaji dalam pertemuan ilmiah tiga tahun terakhir.	
7	Persentase dosen yang berperan sebagai: penyaji (oral/poster) pada pertemuan ilmiah internasional >25%.
6	Persentase dosen yang berperan sebagai: penyaji (oral/poster) pada pertemuan ilmiah internasional 15-25%.
5	Persentase dosen yang berperan sebagai: penyaji (oral/poster) pada pertemuan ilmiah internasional 5-<15%.
4	Persentase dosen yang berperan sebagai: penyaji (oral/poster) pada pertemuan ilmiah nasional >25%.
3	Persentase dosen yang berperan sebagai: penyaji (oral/poster) pada pertemuan ilmiah nasional 10-25%.
2	Persentase dosen yang berperan sebagai: penyaji (oral/poster) pada pertemuan ilmiah nasional <10%.
1	Belum ada dosen yang berperan sebagai: penyaji (oral/poster) pada pertemuan ilmiah nasional.
17.10 Persentase dosen yang berperan sebagai peserta pada pertemuan ilmiah tiga tahun terakhir.	
7	Persentase dosen yang berperan sebagai sebagai peserta pada pertemuan ilmiah internasional >50%.
6	Persentase dosen yang berperan sebagai sebagai peserta pada pertemuan ilmiah internasional 40-50%.
5	Persentase dosen yang berperan sebagai sebagai peserta pada pertemuan ilmiah internasional 30-<40%.
4	Persentase dosen yang berperan sebagai sebagai peserta pada pertemuan ilmiah nasional >50%.
3	Persentase dosen yang berperan sebagai sebagai peserta pada pertemuan ilmiah nasional 40-50%.
2	Persentase dosen yang berperan sebagai sebagai peserta pada pertemuan ilmiah nasional 30-<40%.
1	Persentase dosen yang berperan sebagai sebagai peserta pada pertemuan ilmiah nasional <30%.
17.11 Jumlah pertemuan ilmiah yang diselenggarakan institusi per tahun.	
7	Jumlah pertemuan ilmiah internasional sebanyak >10.
6	Jumlah pertemuan ilmiah internasional 5-10.
5	Jumlah pertemuan ilmiah internasional <5.
4	Jumlah pertemuan ilmiah nasional >50.
3	Jumlah pertemuan ilmiah nasional 20-50.
2	Jumlah pertemuan ilmiah nasional <20.
1	Belum ada pertemuan ilmiah internasional dan nasional.
17.12 Persentase dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah taraf internasional/regional, nasional, dan internal tiga tahun terakhir.	
7	Persentase dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah internasional >10%.
6	Persentase dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah internasional 5-10%.
5	Persentase dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah internasional <5%.
4	Persentase dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah nasional >10%.
3	Persentase dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah nasional 5-10%.
2	Persentase dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah nasional <5%.
1	Tidak ada dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah nasional dan internasional.

J. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

18. Capaian Pengabdian kepada Masyarakat	
18.1 Kejelasan kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat	
7	Adanya dokumen kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian, dilaksanakan di seluruh unit kerja secara konsisten.
6	Adanya dokumen kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian, dilaksanakan di sebagian unit kerja secara konsisten.
5	Adanya dokumen kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di seluruh unit kerja secara konsisten.
4	Adanya dokumen kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di sebagian unit kerja secara konsisten.
3	Adanya dokumen kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di seluruh unit kerja, belum secara konsisten.
2	Adanya dokumen kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di sebagian unit kerja, belum secara konsisten.
1	Tidak adanya dokumen kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat.
18.2 Kejelasan pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.	
7	Adanya pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang baku dan dilaksanakan oleh semua unit kerja secara konsisten
6	Adanya pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang baku dan dilaksanakan oleh sebagian unit kerja secara konsisten.
5	Adanya pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang baku dan dilaksanakan oleh semua unit kerja, belum secara konsisten.
4	Adanya pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang baku dan dilaksanakan oleh sebagian unit kerja, belum secara konsisten.
3	Adanya pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang baku namun belum dilaksanakan.
2	Adanya pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang belum baku.
1	Tidak adanya pedoman pengelolaan pengabdian masyarakat.
18.3 Persentase dosen yang menjalankan pengabdian kepada masyarakat tiga tahun terakhir.	
7	>50% dosen menjalankan pengabdian kepada masyarakat.
6	40-50% dosen menjalankan pengabdian kepada masyarakat.
5	30-<40% dosen menjalankan pengabdian kepada masyarakat.
4	20-<30% dosen menjalankan pengabdian kepada masyarakat.
3	10-<20% dosen menjalankan pengabdian kepada masyarakat.
2	5-<10% dosen menjalankan pengabdian kepada masyarakat.
1	<5% dosen menjalankan pengabdian kepada masyarakat.
18.4 Persentase pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian tiga tahun terakhir.	
7	Persentase pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian >50% dari seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
6	Persentase pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian mencapai 40-50% dari seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5	Persentase pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian 30-<40% dari seluruh

	kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4	Persentase pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian 20-<30% dari seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3	Persentase pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian 10-<20% dari seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2	Persentase pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian <10% dari seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
1	Belum ada pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian.
18.5 Persentase dana yang diperoleh untuk pengabdian kepada masyarakat tiga tahun terakhir.	
7	Persentase dana yang dipergunakan untuk pengabdian kepada masyarakat >30%.
6	Persentase dana yang dipergunakan untuk pengabdian kepada masyarakat 20-30%
5	Persentase dana yang dipergunakan untuk pengabdian kepada masyarakat 15-<20%
4	Persentase dana yang dipergunakan untuk pengabdian kepada masyarakat 10-<15%.
3	Persentase dana yang dipergunakan untuk pengabdian kepada masyarakat 5-10%.
2	Persentase dana yang dipergunakan untuk pengabdian kepada masyarakat <5%
1	Tidak ada persentase dana yang diperoleh dipergunakan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
18.6 Jumlah penghargaan yang diperoleh terkait pengabdian kepada masyarakat.	
7	Institusi memiliki >10 penghargaan terkait pengabdian kepada masyarakat di tingkat internasional.
6	Institusi 5-10 penghargaan terkait pengabdian kepada masyarakat di tingkat internasional.
5	Institusi <5 penghargaan terkait pengabdian kepada masyarakat di tingkat internasional.
4	Institusi memiliki >10 penghargaan terkait pengabdian kepada masyarakat di tingkat nasional.
3	Institusi memiliki 5-10 penghargaan terkait pengabdian kepada masyarakat di tingkat nasional.
2	Institusi memiliki <5 penghargaan terkait pengabdian kepada masyarakat di tingkat nasional.
1	Belum pernah memperoleh penghargaan terkait pengabdian kepada masyarakat.

K. STANDAR KERJASAMA

19. Capaian Kerjasama	
19.1 Kebijakan, pengelolaan, dan monev oleh PT dalam kegiatan kerjasama.	
7	Adanya dokumen kebijakan, pengelolaan, dan monev terkait mutu kegiatan kerjasama, relevansi kegiatan kerjasama, produktivitas kegiatan kerjasama, dan keberlanjutan kegiatan kerjasama yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan di seluruh unit kerja secara konsisten.
6	Adanya dokumen kebijakan, pengelolaan, dan monev terkait mutu kegiatan kerjasama, relevansi kegiatan kerjasama, produktivitas kegiatan kerjasama, dan keberlanjutan kegiatan kerjasama yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan di sebagian unit kerja secara konsisten.
5	Adanya dokumen kebijakan, pengelolaan, dan monev terkait mutu kegiatan kerjasama, relevansi kegiatan kerjasama, produktivitas kegiatan kerjasama, dan keberlanjutan kegiatan kerjasama yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan di seluruh unit kerja

	belum secara konsisten.
4	Adanya dokumen kebijakan, pengelolaan, dan monev terkait mutu kegiatan kerjasama, relevansi kegiatan kerjasama, produktivitas kegiatan kerjasama, dan keberlanjutan kegiatan kerjasama yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan di sebagian unit kerja belum secara konsisten.
3	Adanya dokumen kebijakan, pengelolaan, dan monev terkait mutu kegiatan kerjasama, relevansi kegiatan kerjasama, produktivitas kegiatan kerjasama, dan keberlanjutan kegiatan kerjasama yang lengkap dan jelas tetapi belum dilaksanakan.
2	Adanya dokumen kebijakan, pengelolaan, dan monev terkait mutu kegiatan kerjasama, relevansi kegiatan kerjasama, produktivitas kegiatan kerjasama, dan keberlanjutan kegiatan kerjasama belum lengkap dan jelas dan belum dilaksanakan.
1	Tidak adanya dokumen kebijakan dan pengelolaan oleh perguruan tinggi dalam kegiatan kerja sama.
19.2 Jumlah kerjasama/MoU tiga tahun terakhir.	
7	Jumlah kerjasama dengan institusi internasional dan nasional mencapai >100, dan >80% di antaranya ditindaklanjuti secara efektif dengan aktivitas kerjasama akademik.
6	Jumlah kerjasama dengan institusi internasional dan nasional mencapai >100, tetapi hanya 50-80% di antaranya ditindaklanjuti secara efektif dengan aktivitas kerjasama akademik.
5	Jumlah kerjasama dengan institusi internasional dan nasional berkisar 50-100, dan >80% di antaranya ditindaklanjuti secara efektif dengan aktivitas kerjasama akademik.
4	Jumlah kerjasama dengan institusi internasional dan nasional berkisar 50-100, tetapi hanya 50-80% di antaranya ditindaklanjuti secara efektif dengan aktivitas kerjasama akademik.
3	Jumlah kerjasama dengan institusi internasional dan nasional kurang dari 50, dan >80% di antaranya ditindaklanjuti secara efektif dengan aktivitas kerjasama akademik.
2	Jumlah kerjasama dengan institusi internasional dan nasional kurang dari 50, dan hanya 50-80% di antaranya ditindaklanjuti secara efektif dengan aktivitas kerjasama akademik.
1	Jumlah kerjasama dengan institusi internasional dan nasional kurang dari 50, dan kurang dari 50% di antaranya telah ditindaklanjuti secara efektif dengan aktivitas kerjasama akademik.
19.3 Persentase dosen yang menjadi anggota organisasi profesi atau organisasi keilmuan tiga tahun terakhir.	
7	Persentase dosen yang menjadi anggota organisasi profesi atau organisasi keilmuan internasional >30%.
6	Persentase dosen yang menjadi anggota organisasi profesi atau organisasi keilmuan internasional 20-30%.
5	Persentase dosen yang menjadi anggota organisasi profesi atau organisasi keilmuan internasional <20%.
4	Persentase dosen yang menjadi anggota organisasi profesi atau organisasi keilmuan nasional >30%.
3	Persentase dosen yang menjadi anggota organisasi profesi atau organisasi keilmuan nasional 20-30%.
2	Persentase dosen yang menjadi anggota organisasi profesi atau organisasi keilmuan nasional 10-<20%.
1	Persentase dosen yang menjadi anggota organisasi profesi atau organisasi keilmuan nasional <10%.

19.4 Persentase dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma tiga tahun terakhir.	
7	Persentase dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma > 30%, baik di tingkat internasional maupun nasional.
6	Persentase dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma antara 25-30%, baik di tingkat internasional maupun nasional.
5	Persentase dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma antara 20-<25%, baik di tingkat internasional maupun nasional.
4	Persentase dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma antara 15-<20%, baik di tingkat internasional maupun nasional.
3	Persentase dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma antara 10-<15%, baik di tingkat internasional maupun nasional.
2	Persentase dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma < 10%, baik di tingkat internasional maupun nasional.
1	Belum ada dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma di tingkat internasional maupun nasional.
19.5 Persentase pertukaran mahasiswa dalam kegiatan Tri Dharma tiga tahun terakhir.	
7	Persentase mahasiswa yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma >20%, baik di tingkat internasional maupun nasional.
6	Persentase mahasiswa yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma antara 15-20%, baik di tingkat internasional maupun nasional.
5	Persentase mahasiswa yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma antara 10-<15%, baik di tingkat internasional maupun nasional.
4	Persentase mahasiswa yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma antara 5-<10%, baik di tingkat internasional maupun nasional.
3	Persentase mahasiswa yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma kurang dari 5%, baik di tingkat internasional maupun nasional.
2	Persentase mahasiswa yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma < 5%, belum ada di tingkat internasional.
1	Belum ada mahasiswa yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma di tingkat internasional maupun nasional.
19.6 Akses ke perpustakaan dengan pihak luar melalui skema kerjasama.	
7	Akses kerjasama perpustakaan dengan berbagai pihak, di dalam dan luar negeri yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
6	Akses kerjasama perpustakaan dengan berbagai pihak, di dalam dan luar negeri yang dilaksanakan belum secara berkelanjutan.
5	Akses kerjasama perpustakaan dengan berbagai pihak luar negeri yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
4	Akses kerjasama perpustakaan dengan berbagai pihak luar negeri yang dilaksanakan belum secara berkelanjutan.
3	Akses kerjasama perpustakaan dengan berbagai pihak di dalam negeri yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
2	Akses kerjasama perpustakaan dengan berbagai pihak di dalam negeri yang dilaksanakan belum secara berkelanjutan
1	Belum ada akses perpustakaan dengan pihak luar melalui skema kerjasama.

19.7 Jumlah mahasiswa internasional dari total mahasiswa	
7	> 5%.
6	4%-5%.
5	3%-4%.
4	2%-3%.
3	1%-2%.
2	1%.
1	Belum ada mahasiswa internasional.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 16 Januari 2018

Institut Teknologi Del

Rektor,



Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M.Tech., Ph.D.

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Del;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan;
4. Para Ketua Program Studi;
5. Para Dosen.